

Kata Pengantar

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2024 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Surakarta melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya di tahun 2024, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan LKjIP ini juga sebagai bentuk kepatuhan Sekretariat DPRD Kota Surakarta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Substansi pokok LKjIP Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2024 ini memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Surakarta selama tahun 2024, sekaligus menginformasikan berbagai permasalahan yang dihadapi dan upaya solusi penyelesaiannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat mendukung terwujudnya visi misi Sekretariat DPRD Kota Surakarta sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Surakarta 2021-2026.

Namun demikian, dalam penyusunan LKjIP ini masih banyak terdapat kekurangan baik menyangkut format dan substansinya, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKjIP dimasa mendatang. Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kota Surakarta mampu menunjukkan kinerjanya secara lebih nyata.

Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini dan semoga dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh selama satu tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya di Sekretariat DPRD Kota Surakarta secara lebih sinergis.

Surakarta, Januari 2025

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINIR SULTANU HAKIM, SH.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670610 199402 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... 1

Daftar Isi..... 2

Ikhtisar Eksekutif..... 3

BAB I PENDAHULUAN..... 6

 A. Gambaran Umum Organisasi..... 6

 B. Fungsi Strategis Sekretariat DPRD..... 15

 C. Permasalahan Utama yang dihadapi Sekretariat DPRD..... 17

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 19

 A. RENCANA KINERJA TAHUN 2024..... 19

 B. Perjanjian Kinerja (PK)..... 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024..... 34

 A. Capaian Kinerja Organisasi..... 34

 B. Realisasi Anggaran..... 57

BAB IV PENUTUP..... 62

 A. Strategi Untuk Peningkatkan Kinerja di Masa Datang..... 62

Lampiran

 1. Pengukuran Perjanjian Kinerja Tahun 2025

 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024 (Simdalbangda)

 3. Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Surakarta
 Tahun 2023 dan Tahun 2024

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2024 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Pemerintah Kota Surakarta sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan *clean goverment* dan *good governance*, maka AKIP disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKjIP Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2024 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2024 sebagai bagian dari upaya pencapaian visi Sekretariat DPRD Kota Surakarta “*Meningkatkan Integritas, Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur*”.

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, LKjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2024, tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada di dalam LKjIP tersebut diharapkan segenap stakeholders di Sekretariat DPRD Kota Surakarta dapat secara bersama-sama berperan aktif dan bekerjasama guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat DPRD Kota Surakarta di tahun-tahun selanjutnya.

Sebagaimana kita ketahui bersama, banyak perubahan yang terjadi di tahun 2024 disebabkan oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh dampak yang ditimbulkan dari pemulihan yang disebabkan oleh perubahan sistem dari FMIS ke aplikasi SIPD RI. Adanya perubahan sistem tersebut pada akhirnya berdampak pada tidak maksimalnya realisasi capaian kinerja maupun anggaran daripada Sekretariat DPRD Kota Surakarta, dikarenakan terkendala proses sinkronisasi FMIS ke Sistem Pengelola Keuangan yang baru yaitu aplikasi SIPD RI.

Di sisi lain, kondisi tersebut menuntut realokasi dan reorientasi belanja APBN/APBD. Hal tersebut menyebabkan adanya penambahan anggaran yang dikenakan pada setiap OPD di Lingkup Pemerintah Kota Surakarta. Pada Sekretariat DPRD Kota Surakarta, mengalami 1 kali pengurangan

anggaran, di mana jumlah Rp 1.713.725.765,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*) atau setara dengan 9,76% dari pagu sebelumnya. Lalu mengalami juga 1 kali penambahan anggaran, sebesar Rp. 4.250.316.052,- (*Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Lima Puluh Dua Rupiah*) atau setara dengan 17,46%

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat DPRD Kota Surakarta pada tahun 2024 dapat dikatakan **Sangat Baik / Berhasil**. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kota Surakarta 2024 dan Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kota Surakarta 2024.

Hasil pengukuran capaian kinerja yang telah dilakukan atas indikator kinerja utama yang ada, di Sekretariat DPRD Kota Surakarta memiliki capaian sebesar 84,81%.

Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yang berkategori sangat baik, sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

Beberapa hal yang perlu juga menjadi perhatian terkait hasil pengukuran capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2024, antara lain :

1. Pada awal tahun adanya kendala sinkronisasi diantara system pengelolaan keuangan yaitu simda keuangan ke *SIMS* ke SIPD RI.
2. Adanya beberapa kegiatan yang tidak bisa terealisasi secara maksimal karena terbentur pada aturan dan kebijakan Pemerintah Kota dan Daerah sehingga tidak sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.
3. Keterbatasan SDM dan kurangnya pemahaman SDM aparatur dalam menyikapi perubahan aturan pengelolaan keuangan maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dalam pengusulan dan/atau pelaksanaan kegiatan masih sering dijumpai adanya program kerja yang kurang selaras dengan sasaran strategis dan prioritas kegiatan yang merupakan kebutuhan mendasar dalam memfasilitasi legislatif.

Untuk itu, kedepan perlu dilakukan beberapa perbaikan agar target kinerja dapat dicapai sesuai dengan yang ditetapkan, antara lain :

1. Diharapkan OPD yang menangani pengelolaan keuangan tingkat Pemerintah Kota Surakarta dapat memberikan solusi dan opsi lain terkait masalah tersebut.
2. Memahami aturan dan peraturan yang berlaku sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tanpa terkendala aturan yang ada.
3. Penambahan SDM dan peningkatan pemahaman SDM aparatur terhadap perubahan aturan pengelolaan keuangan maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dalam pengusulan dan/atau pelaksanaan kegiatan tidak lagi dijumpai adanya program

kerja yang kurang selaras dengan sasaran strategis dan prioritas kegiatan.

Semoga, LKJIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dan diharapkan mampu memberi informasi serta referensi efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Surakarta khususnya dan pemerintah Kota Surakarta pada umumnya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Sekretariat DPRD Kota Surakarta, berdasarkan pada Peraturan Daerah Perda Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Walikota No. 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Tugas pokok Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah (KKD).

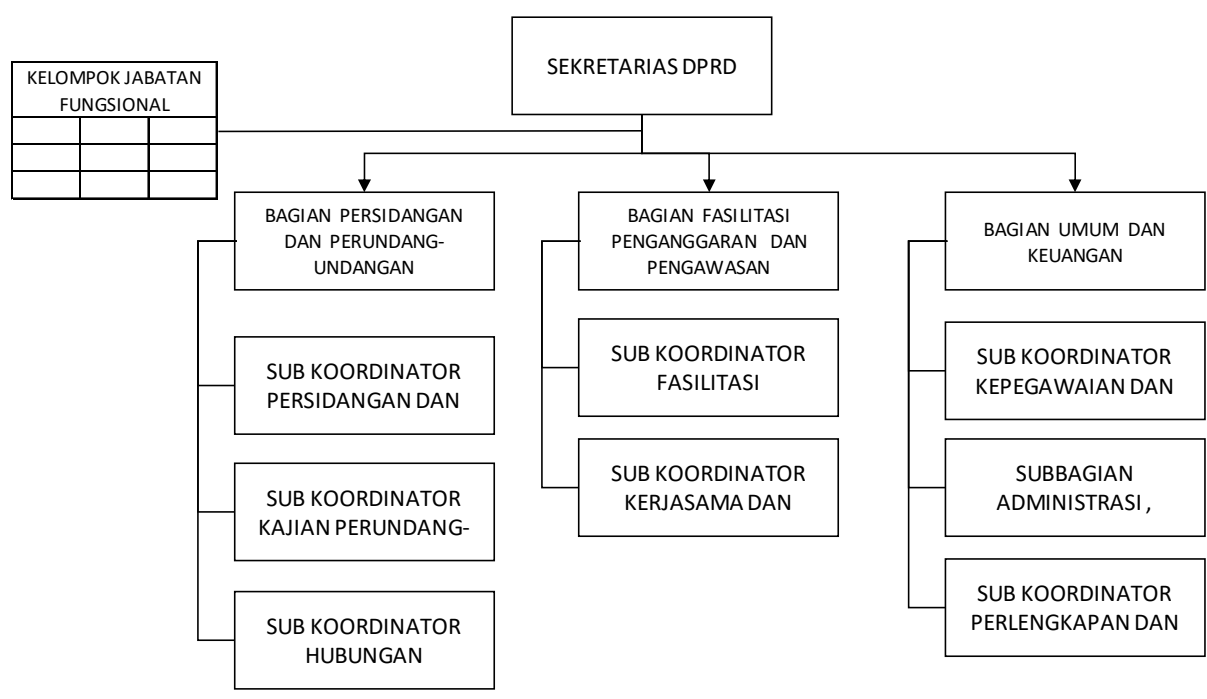
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- 3) Penyelenggaraan rapat – rapat DPRD;
- 4) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, susunan organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris;
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri atas:
 1. Sub Koordinator Persidangan dan Risalah;
 2. Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan;
 3. Sub Koordinator Hubungan Masyarakat; dan
 4. Jabatan Fungsional lainnya.
- c. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas:
 1. Sub Koordinator Fasilitas Penganggaran;
 2. Sub Koordinator Kerjasama dan Aspirasi; dan
 3. Jabatan Fungsional lainnya.
- d. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:
 1. Subbagian Administrasi , Perencanaan, dan Keuangan; dan
 2. Jabatan Fungsional lainnya, terdiri atas :
 - Sub Koordinator Kepegawaian Dan Organisasi; dan

- Sub Koordinator Perlengkapan dan Rumah Tangga.
- e. kelompok jabatan fungsional.



Gambar

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Surakarta Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

a. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) mengoordinasikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD;
- 2) mengoordinasikan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi;
- 3) mengoordinasikan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan
- 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kesekretariatan;
- 5) memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan;
- 6) menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 7) merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai peraturan perundang undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- 8) mengoordinasikan penyusunan rencana dan program, evaluasi serta pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 9) mengoordinasikan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan sesuai peraturan perundang undangan guna tertib administrasi keuangan;

- 10) mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas dan ketatalaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 11) mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan guna tertib administrasi kepegawaian;
- 12) mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 13) mengkoordinasikan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- 14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

b. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan. Kepala Bagian

Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas penyelenggaraan persidangan, penyusunan risalah dan kajian peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, publikasi dan protokoler sidang/rapat DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Bagian persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas:

- 1) Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD;
- 2) Pelaksanaan fasilitas tugas DPRD;
- 3) Pelaksanaan fasilitas peningkatan kapasitas DPRD;
- 4) Membagi tugas, memberikan petunjuk dan memberikan bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- 5) Mengendalikan, meneliti dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- 6) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan. Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan

fasilitasi penganggaran, kerjasama dan aspirasi.

Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi:

- 1) pengkoordinasikan dan memfasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat;
pengkoordinasikan dan memfasilitasi pembahasan kerjasama daerah;
- 2) pengkoordinasikan dan memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) pengkoordinasikan dan memfasilitasi, pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD;
- 4) pengkoordinasikan dan memfasilitasi pembahasan kebijakan anggaran;
- 5) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya

d. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan. Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan kepegawaian, program dan keuangan serta rumah tangga.

Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- d. Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- e. Penyediaan fasilitas fraksi DPRD;
- f. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- g. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- i. Penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- j. Pelaksanaan evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. Pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- l. Pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- m. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- n. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- o. Pengkoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- p. penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik;
- q. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- r. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- s. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus ada di Perangkat Daerah, karena kinerja aparatur akan menentukan tingkat kinerja Perangkat Daerah tersebut. Berdasarkan data kepegawaian tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Surakarta terdapat 57 orang pegawai yang terdiri dari 28 ASN dan 29 orang Non ASN. Berikut data jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Sekretariat DPRD Kota Surakarta :

a. SDM Sekretariat DPRD Kota Surakarta Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.1
Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Surakarta
Berdasarkan Pendidikan

No	Tk Pendidikan Pegawai	S2	S1	D3	SLTA	JUMLAH
1	ASN	5	14	-	6	25
2	PPPK	-	2	2	-	4
3	TKPK	-	13	2	10	25
	JUMLAH	5	28	4	15	54

b. SDM Sekretariat DPRD Kota Surakarta Berdasarkan Gender

Tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung sedang. Hal ini dapat dilihat bahwa yang berpendidikan S2 sebanyak 9,8% (5 orang); berpendidikan S1 sebesar 54,9% (28 orang); pegawai dengan tingkat pendidikan Diploma 3 sebesar 7,8 % (4 orang) dan pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 29,41% (15 orang). Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa jumlah ASN dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Surakarta masih kurang secara kualitas dan kuantitas apabila dibandingkan dengan beban kerja, hal ini tentunya harus menjadi perhatian untuk penambahan ASN agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi lebih optimal.

Berdasarkan tingkat golongan, ASN di Sekretariat DPRD Kota Surakarta didominasi oleh Golongan III sebanyak 21 orang, Golongan II sebanyak 14 orang dan golongan IV sebanyak 8 orang. Selengkapnya jumlah ASN berdasarkan tingkat golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2. Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Golongan Sekretariat DPRD
Kota Surakarta Tahun 2024

NO	GOLONGAN	ASN		JUMLAH
		L	P	
1	IV	3	5	8
2	III	5	4	9
3	II	9	0	9
4	I	0	0	0
5	NON GOLONGAN	1	1	2
JUMLAH		18	10	28

Tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat golongan ASN cukup tersebar. Hal ini dapat dilihat bahwa golongan IV sebanyak 28,6%, golongan III 32,1%, dan golongan II 32,1 %, dan golongan I 0 %. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa jumlah ASN dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Surakarta masih kurang secara kualitas dan kuantitas terutama untuk golongan yang banyak mengerjakan tugas dan fungsi administrasi. Apabila dibandingkan dengan beban kerja, hal ini tentunya harus menjadi perhatian untuk penambahan ASN agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi lebih optimal.

2.1 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sekretariat DPRD Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas sehari-harinya dibantu unsur pelaksanaan sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.1 Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Surakarta

Berdasarkan Pendidikan Terakhir Ditamatkan Tahun 2023-2024

NO	PENDIDIKAN	ASN		NON ASN		JUMLAH	%
		L	P	L	P		
1	S2	2	3	0	0	5	9,2%
2	S1	10	4	5	9	28	51,85%
3	D3	0	2	1	1	4	7,4%
4	SMA	6	0	10	1	17	31,48%
JUMLAH		18	9	16	11	54	

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki perangkat daerah Sekretariat DPRD Kota Surakarta :

Tabel 2.2.2.1
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Jenis>Nama Aset	Alamat
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen.	Jl. Adi Sucipto No.143 A Surakarta
2.	Gedung Pos Jaga Permanen Surakarta jln. Blewah, permanen.	Rumah Dinas Pimpinan DPRD Kota

3.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen.	Jl. Adi Sucipto No.143 A Surakarta
4.	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen.	Jl. Blewah Raya No. 9 karangasem
5.	Rumah Negara Gol I Lain-lain,permanen, Solo.	Jl. Blewah Raya No. 9 karangasem

Tabel 2.2.2.2
Jumlah Aset di Perangkat Daerah Tahun 2023

NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.440	BAIK
ALAT BESAR	5	BAIK
- pompa lainnya (dst)	5	BAIK
KOMPUTER	243	BAIK
- Local Area Network (LAN)	1	BAIK
- Internet	8	BAIK
- Komputer Jaringan lainnya	4	BAIK
- P.C Unit	49	BAIK
- Lap Top	40	BAIK
- Note Book	35	BAIK
- Personal Komputer lainnya	50	BAIK
- Peralatan Minikomputer lainnya	4	BAIK
- Printer (Peralatan Personal Komputer)	34	BAIK
- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	BAIK
- External/ Portable Hardisk	5	BAIK
- Peralatan Personal Komputer lainnya	5	BAIK
- Server	1	BAIK
- Wireless Access Point	1	BAIK
- Peralatan Jaringan lainnya	4	BAIK
ALAT ANGKUTAN	33	BAIK
- Sedan	4	BAIK
- Station Wagon	12	BAIK
- Pick Up	1	BAIK
- Sepeda Motor	16	BAIK
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1	BAIK
- Mesin Gergaji	1	BAIK
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	961	BAIK
- Mesin Ketik Listrik	1	BAIK
- Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi)	3	BAIK
- Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	BAIK
- Mesin Fotocopy Double Folio	1	BAIK
- Lemari Besi/Metal	3	BAIK
- Lemari Kayu	12	BAIK
- Rak Besi	19	BAIK
- Rak Kayu	16	BAIK
- Filing Cabinet Besi	12	BAIK
- Filing Cabinet Kayu	2	BAIK
- Brandkas	1	BAIK
- Lemari Kaca	3	BAIK
- Lemari Makan	1	BAIK
- Alat Penghancur Kertas	2	BAIK
- Mesin Absensi	1	BAIK
- Overhead Projector	3	BAIK
- LCD Projector/Infocus	8	BAIK
- Focusing Screen/Layar LCD Projector	4	BAIK

NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
- Papan Nama Instansi	2	BAIK
- Papan Pengumuman	1	BAIK
- Alat Kantor Lainnya	8	BAIK
- Meja Kerja Kayu	4	BAIK
- Meja Rapat	66	BAIK
- Tempat Tidur Kayu	21	BAIK
- Meja Resepsionis	3	BAIK
- Meja 1/2 Biro	70	BAIK
- Meja Makan Besi	13	BAIK
- Kursi Rapat	41	BAIK
- Kursi Tamu	5	BAIK
- Kursi Putar	70	BAIK
- Meja Komputer	3	BAIK
- Sofa	7	BAIK
- Meubeleur lainnya	11	BAIK
- Mesin Pemotong Rumput	3	BAIK
- Mesin Cuci	7	BAIK
- Alat Pembersih lainnya	18	BAIK
- Lemari Es	11	BAIK
- A.C. Sentral	6	BAIK
- A.C. Window	20	BAIK
- A.C. Split	77	BAIK
- Kipas Angin	4	BAIK
- Alat Pendingin lainnya	1	BAIK
- Kompor Gas (Alat Dapur)	5	BAIK
- Rice Cooker (Alat Dapur)	3	BAIK
- Alat Dapur lainnya	11	BAIK
- Televisi	34	BAIK
- Amplifier	4	BAIK
- Equalizer	1	BAIK
- Loudspeaker	8	BAIK
- Sound System	7	BAIK
- Compact Disc	4	BAIK
- Karaoke	3	BAIK
- Wireless	2	BAIK
- Microphone	12	BAIK
- Mic Conference	8	BAIK
- Camera Video	11	BAIK
- Camera film	3	BAIK
- Tustel	1	BAIK
- Alat Hiasan	31	BAIK
- Lambang Garuda Pancasila	2	BAIK
- Tangga Aluminium	1	BAIK
- Dispenser	28	BAIK
- Coffee Maker	3	BAIK
- Handy Cam	1	BAIK
- Karpet	17	BAIK
- Gordyin/Kray	13	BAIK
- Alat Pemanas Ruangan	9	BAIK
- Alat Rumah Tangga Lain-lain	54	BAIK
- Pompa Kebakaran/Portable	1	BAIK
- Panel Pengontrol Kebakaran	3	BAIK
- Hidran Kebakaran	3	BAIK
- Alat Pembantu Kebakaran	3	BAIK
- Alat Pemadam Kebakaran lainnya	6	BAIK

NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
- Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	1	BAIK
- Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	1	BAIK
- Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	BAIK
- Meja Tamu Ruangan Tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD	1	BAIK
- Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1	BAIK
- Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	2	BAIK
- Meja Tamu Biasa	1	BAIK
- Meja Maket/Peta	1	BAIK
- Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	2	BAIK
- Kursi Kerja Pejabat lainnya	75	BAIK
- Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	8	BAIK
- Kursi Tamu di Ruangan Ketua/Wakil Ketua DPRD	4	BAIK
- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	4	BAIK
- Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	2	BAIK
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	184	BAIK
- Compact Disc Player	2	BAIK
- Multitrack Recorder	8	BAIK
- Audio Visual	1	BAIK
- Microphone/Wireless MIC	5	BAIK
- Microphone/Boom Stand	11	BAIK
- Power Supply Microphone	1	BAIK
- Professional Sound System	1	BAIK
- Power Amplifier	1	BAIK
- Chairman/Audio Conference	61	BAIK
- peralatan studio audio lainnya (dst)	56	BAIK
- Camera Electronic	1	BAIK
- Video Mixer	1	BAIK
- Video Switcher	2	BAIK
- Camera Wall Box	4	BAIK
- Teleprompter	1	BAIK
- Camera Film	3	BAIK
- Lensa Kamera	3	BAIK
- Layar Film/Projector	2	BAIK
- Alat Studio Video Lainnya	11	BAIK
- Telephone (PABX)	1	BAIK
- Telephone Mobile	4	BAIK
- Antene SHF Stationary	3	BAIK
- switcher/menara antena lainnya (dst)	1	BAIK
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1	BAIK
- alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	1	BAIK
ALAT LABORATORIUM	12	BAIK
- Camero Photo Micrograph	4	BAIK
- Central Controler	2	BAIK
- Distiling Apparatus	3	BAIK
- Recorder	1	BAIK
- Bendera Merah Putih	1	BAIK
- Infrared Thermometer	1	BAIK
TOTAL	1440	BAIK

Aset sumber daya yang saat ini dimiliki sudah mampu untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari, namun ada beberapa hal yang perlu ditambahkan dalam hal pengembangan dan pemeliharaan peralatan, untuk mendukung pekerjaan. Pembangunan ruang

arsip misalnya, masih diperlukan untuk menata arsip arsip maupun risalah – risalah rapat yang meningkat jumlahnya di setiap tahun.

Website, Aplikasi E-Tamu, dan Bangunan Sistem Publikasi Produk Hukum DPRD yang dikembangkan dan perlu diperbaharui untuk menunjang kegiatan selama 5 tahun ke depan begitupun dengan alat-alat yang digunakan untuk pengembangan sistem dan dokumentasi kegiatan kerja DPRD sebagai Output media baik secara lokal maupun platform digital dibutuhkan penguatan server baru dan jaringan serta pembaharuan instalasi jaringan internet untuk lingkungan DPRD.

Kamera video sebagai perekam gambar dan video rapat juga dibutuhkan dan ditempatkan disetiap ruang rapat. Hal ini untuk menunjang aktivitas rapat dan dokumentasi rapat jika diperlukan. Penambahan komputer, laptop, dan notebook dan proyektor sebagai alat bantu presentasi rapat, perlu dilakukan pembaharuan setiap 2 tahun karena instensitas pemakaian yang tinggi saat rapat-rapat DPRD.

Sound System Gedung Graha Paripurna telah dilakukan perubahan dengan menggunakan platform digital dimana ke depan akan memberi kemudahan dalam pengintergrasian sistem guna kelancaran dalam hal pengolahan data audio untuk kepentingan dokumentasi agenda paripurna ataupun *live streaming* paripurna DPRD di platform digital. Hal ini dilakukan pengembangan setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan kepada masyarakat Kota Surakarta.

Pengunjung *website* DPRD sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 10,642 Ribu *visit*, 89 ribu pengunjung dengan lebih dari 140 berita yang telah di publikasi melalui *website*.

B. Fungsi Strategis Sekretariat DPRD Kota Surakarta

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. **Rencana strategis Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2021 s/d 2026** merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kota Surakarta dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2021 s/d 2026.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi yaitu:

Visi dan Misi

Visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Surakarta dirumuskan dari visi dan misi Walikota terpilih periode 2021-2026. Visi Walikota tersebut adalah :

“Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya Yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, Dan Sejahtera”

Adapun misi Kota Surakarta periode 2021 – 2026 :

- a. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan
- b. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan
- c. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata dan pemajuan kebudayaan berkelanjutan
- d. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga
- e. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan
- f. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif
- g. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

2. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut, terdapat misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan tugas dan wewenang DPRD
- b. Meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana, dan manajemen keuangan dalam mendukung kinerja Sekretariat Dewan.
- c. Mengembangkan aksesibilitas masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
- d. Memperkuat peran Sekretariat Dewan dalam menjalankan fungsi – fungsi DPRD.

3. Tujuan

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPRD.
- b. Terwujudnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis *e-goverment*.
- c. Meningkatkan pencapaian target penetapan perda dengan propemperda.
- d. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendokumentasian kegiatan DPRD dan materi rapat DPRD serta produk hukum yang dihasilkan.
- e. Meningkatnya nilai kepuasan Anggota DPRD.
- f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

4. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Sekretariat DPRD Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui bimbingan teknis, studi lanjut, pelatihan dan workshop khusus sesuai dengan kebutuhan pelayanan DPRD.
- b. Meningkatkan kualitas Tenaga Ahli melalui perbaikan proses seleksi Tenaga Ahli, penetapan standar Tenaga Ahli, pelaksanaan MOU dengan lembaga pengirim dan memperluas Tenaga Ahli dari non Perguruan Tinggi.
- c. Meningkatkan ketersediaan penunjang kinerja melalui pemenuhan kualitas sarana dan prasarana, reformasi pengelolaan keuangan, dan penyediaan administrasi perkantoran yang lengkap.
- d. Mengembangkan aksesibilitas masyarakat melalui pengembangan Informasi Teknologi, peningkatan kualitas reses, kerjasama media massa dan pengembangan publik hearing serta sosialisasi dengan tokoh masyarakat.
- e. Meningkatkan pengelolaan dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan melalui penyediaan sarana dan prasarana kearsipan, penyusunan sistem pengelolaan dokumentasi dan kearsipan, digitalisasi arsip dan dokumentasi dan sistem otomatis

5. Sasaran :

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya aparatur SDM yang memiliki kompetensi dan kapasitas berdasarkan standar kompetensi,
- b. Meningkatnya pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi,
- c. Terwujudnya penetapan Perda sesuai dengan kebutuhan,
- d. Terwujudnya arsip materi rapat, produk perundang – undangan dan kegiatan DPRD yang tertata,
- e. Meningkatnya nilai kepuasan Anggota DPRD,
Meningkatnya respon masyarakat terhadap informasi legislatif.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Sekretariat DPRD

Adapun permasalahan Utama Sekretariat DPRD yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan fasilitasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam menunjang tugas pokok dan fungsi.
2. Jumlah dan kualitas SDM yang melayani tugas sehari-hari kurang optimal.
3. Belum optimalnya pengelolaan peralatan, perlengkapan dan perbekalan kantor.
4. Belum optimalnya penyebaran informasi kegiatan DPRD kepada masyarakat
5. Belum optimalnya pengelolaan aspirasi masyarakat.

6. Masih ada bidang tugas yang belum relevan dengan bagian yang menaungi (sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan)
7. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan.
8. Masih kurangnya kuantitas SDM dalam menjalankan tugas bagian keuangan.
9. Belum optimalnya pemahaman terhadap peraturan perUndang-undangan.
Kurang optimalnya tenaga ahli fraksi untuk membantu Fraksi Dewan dalam menjalankan tugas
10. Belum optimalnya jumlah dan kualitas keterlibatan tenaga ahli dalam membantu tugas-tugas pendampingan DPRD
11. Masih belum optimalnya pencapaian target penetapan Perda dengan Propemperda
12. Belum optimalnya aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD dapat direalisasikan
13. Kualitas Naskah Akademik yang dihasilkan untuk membantu penyelenggaraan hak inisiatif DPRD belum optimal.
14. Belum optimalnya pendokumentasian kegiatan DPRD dan materi rapat DPRD serta produk hukum yang dihasilkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih. Renstra Sekretariat DPRD Kota Surakarta tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2021-2026. Renstra tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Surakarta yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun dimana di dalam Renja tersebut memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Perjanjian Kinerja (PK) menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

A. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah bentuk pertanggung-jawaban atas kinerja dari perangkat daerah kepada publik. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional.

1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Surakarta berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Sekretariat DPRD
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Fungsi lainnya kewenangan dukungan fungsi DPRD
TUGAS	:	Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan
FUNGSI	:	a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema prioritas RKPD	Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengukur jumlah aspirasi masyarakat yang selaras dengan sasaran jangka menengah daerah dan tersampaikan melalui forum reses DPRD.
		Formulasi Pengukuran: <i>aspirasi dalam pokok pikiran DPRD sesuai dengan proritas tema prioriras RKPD th (n)/Seluruh aspirasi dalam pokok pikiran DPRD th (n) x100%</i>
		Definisi Operasional: Aspirasi masyarakat adalah usulan masyarakat perihal kebutuhan, permasalahan, dan gagasan yang disampaikan kepada anggota DPRD pada saat reses maupun non reses. Pokok-pokok pikiran Dewan adalah dokumen yang memuat sajian telaah Dewan atas rekapitulasi usulan mayarakat yang disampaikan kepada DPRD, untuk selanjutnya diusulkan kepada OPD pada forum gabungan OPD, sebagai tahapan proses penyusunan RKPD.

2. Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Nomenklatur Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dengan beberapa program yang memiliki indikator sasaran Perangkat Daerah seperti pada tabel berikut :

Tabel . Tabel Indikator dan Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah
Tahun 2024 Sesuai Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2021–2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
1	<i>Terwujudnya birokrasi yang responsive, adaptif, gesit, dan kolaboratif</i>	<i>Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema RKPD</i>	%	57
	<i>Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD</i>	<i>Persentase layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai SOP</i>	%	58
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah aspirasi masyarakat dalam pokok pikiran DPRD yang sesuai sasaran RPJMD dibagi sesuai seluruh aspirasi masyarakat dikalikan 100	%	48,78
3		Jumlah layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi sesuai SOP dibagi jumlah rencana layanan dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi dikalikan 100	%	82
4	<i>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</i>	<i>Jumlah perda yang disahkan dibagi jumlah raperda yang dibahas dikalikan 100</i>	%	82,42
5	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1
6	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen	12
7	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	3
8	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	Dokumen	4
9	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	1
10	<i>Pembahasan Kebijakan Anggaran</i>	<i>Jumlah kebijakan anggaran yang telah dibahas dibagi jumlah kebijakan anggaran yang direncanakan dibahas dikalikan 100</i>	%	80,45
11	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1
12	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1
13	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
14	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen	1
15	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	2
16	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1
17	<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	<i>Jumlah realisasi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan dibagi jumlah rencana pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan dikalikan 100%</i>	<i>kegiatan</i>	96
18	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	24
19	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	24
20	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	24
21	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	24
22	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1
23	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	1
24	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	Dokumen	1
25	<i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i>	<i>Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bintek peningkatan kapasitas dibagi seluruh jumlah anggota DPRD dikalikan 100%</i>	%	75,12
26	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	1
27	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6
28	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	4
30	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	4
31	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	1
32	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1
33	<i>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>	<i>Jumlah aspirasi masyarakat yang terserap dibagi target penyerapan aspirasi masyarakat dikalikan 100%</i>	%	53,41
34	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	12

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
35	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	3
36	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3
37	<i>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	<i>Jumlah Kode Etik DPRD yang tersusun.</i>	%	100
38	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1
39	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	12
40	<i>Pembahasan Kerja Sama Daerah</i>	<i>Jumlah kerjasama daerah yang dibahas dan disahkan</i>	<i>dokumen</i>	2
41	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	1
42	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen	1
43	<i>Fasilitasi Tugas DPRD</i>	<i>Jumlah realisasi pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD dibagi jumlah rencana pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD dikalikan 100</i>	%	85,85
44	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	51
45	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	1
46	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	12
47	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	12
48	<i>Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien</i>	<i>Nilai Maturitas Kelembagaan</i>	<i>Skor</i>	<i>48</i>
49		<i>Nilai SAKIP</i>	<i>Skor</i>	<i>67</i>
50	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP berdasarkan perhitungan SAKIP sesuai dengan peraturan perundangan	Skor	77,90
51		Nilai SKM berdasarkan perhitungan SKM sesuai dengan peraturan perundangan	Skor	86
53		Nilai SPIP berdasarkan perhitungan SPIP sesuai dengan peraturan perundangan	Skor	3,8
54	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah kebutuhan untuk administrasi umum yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan untuk administrasi umum yang direncanakan dipenuhi dikalikan 100</i>	%	100
55	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1
56	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
57	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1
58	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1
59	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2
60	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1
61	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12
62	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
63	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1
64	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1
65	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan dan Operasional.</i>	%	92,89
68	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	80
69	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5
71	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15
73	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi jumlah asa penunjang urusan pemerintahan yang direncanakan dipenuhi dikalikan 100</i>	%	100
74	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1
75	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
77	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
78	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah BMD Penunjang Sekretariat DPRD yang terpelihara dikali 100</i>	%	100
79	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	13
81	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	25
82	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	57

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
84	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Bulan	12
85	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bulan	12
87	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terealisasi dibagi dengan dokumen perencanaan penganggaran dikali 100</i>	%	100
88	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	2
89	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	2
90	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	2
91	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2
92	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2
93	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	1
94	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4
95	<i>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>	<i>Jumlah realisasi pelaksanaan layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dibagi jumlah rencana pelaksanaan layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dikalikan 100</i>	%	100
96	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/ Bulan	45
97	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	2
98	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	45
99	<i>Kegiatan Layanan Administrasi DPRD</i>	<i>Jumlah realisasi pelaksanaan layanan Administrasi DPRD dibagi jumlah rencana pelaksanaan layanan Administrasi DPRD dikalikan 100</i>	%	100
100	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	1
101	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	12

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
102	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12
103	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	12
104	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen-dokumen yang terealisasi dibagi dengan jumlah dokumen keuangan yang tersusun dikali 100</i>	%	100
105	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/ bln	406
107	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2
108	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1
109	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1
110	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah kebutuhan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD yang terpenuhi dibagi jumlah rencana kebutuhan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD dikalikan 100</i>	%	100
112	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1
113	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	360
114	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	62
115	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Kota SurakartaTahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
1	<i>Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD</i>	<i>Persentase layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai SOP</i>	%	58
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah aspirasi masyarakat dalam pokok pikiran DPRD yang sesuai sasaran RPJMD dibagi sesuai seluruh aspirasi masyarakat dikalikan 100	%	48,78

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
3		Jumlah layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi sesuai SOP dibagi jumlah rencana layanan dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi dikalikan 100	%	82
4	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah perda yang disahkan dibagi jumlah raperda yang dibahas dikalikan 100	%	81
5	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1
6	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	12
7	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	3
8	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	4
9	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	1
10	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah kebijakan anggaran yang telah dibahas dibagi jumlah kebijakan anggaran yang direncanakan dibahas dikalikan 100	%	59,2
11	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1
12	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1
13	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1
14	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1
15	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	2
16	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1
17	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah realisasi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan dibagi jumlah rencana pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan dikalikan 100%	kegiatan	96
18	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	24
19	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	24
20	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	24
21	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	24
22	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
23	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	1
24	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1
25	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bintek peningkatan kapasitas dibagi seluruh jumlah anggota DPRD dikalikan 100%	%	73,4
26	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	0
27	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6
28	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	5
29	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	30
30	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	4
31	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	1
32	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1
33	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah aspirasi masyarakat yang terserap dibagi target penyerapan aspirasi masyarakat dikalikan 100%	%	48,78
34	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	12
35	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	3
36	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3
37	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik DPRD yang tersusun.	%	1
38	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1
39	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	12
40	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah kerjasama daerah yang dibahas dan disahkan	dokumen	2
41	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	1
42	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen	1
43	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah realisasi pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD dibagi jumlah rencana pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD dikalikan 100	%	83,60
44	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	51
45	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	1
46	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	12

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
47	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	12
48	<i>Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien</i>	<i>Nilai Maturitas Kelembagaan</i>	<i>Skor</i>	<i>45</i>
49		<i>Nilai PMPRB</i>	<i>Skor</i>	<i>14</i>
50	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Skor	65
51		Nilai SKM	Skor	85
52		Nilai Maturitas Kelembagaan	Skor	44
53		Nilai Maturitas SPIP	Skor	3,7
54	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan untuk administrasi umum yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan untuk administrasi umum yang direncanakan dipenuhi dikalikan 100	%	100
55	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1
56	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1
57	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1
58	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1
59	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2
60	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1
61	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12
62	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
63	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1
64	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1
65	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan dan Operasional.	%	91,6
66	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0
67	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0
68	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	80
69	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5
70	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0
71	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
72	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1
73	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi jumlah asa penunjang urusan pemerintahan yang direncanakan dipenuhi dikalikan 100	%	100
74	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1
75	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
76	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0
77	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
78	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Sekretariat DPRD yang terpelihara dikali 100	%	100
79	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	13
80	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0
81	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20
82	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	56
83	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0
84	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1
85	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4
86	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0
87	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terealisasi dibagi dengan dokumen perencanaan penganggaran dikali 100	%	100
88	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	2
89	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	2
90	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
91	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2
92	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2
93	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	1
94	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4
95	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah realisasi pelaksanaan layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dibagi jumlah rencana pelaksanaan layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dikalikan 100	%	100
96	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/ Bulan	45
97	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	2
98	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	45
99	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Jumlah realisasi pelaksanaan layanan Administrasi DPRD dibagi jumlah rencana pelaksanaan layanan Administrasi DPRD dikalikan 100	%	100
100	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	1
101	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	12
102	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12
103	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	12
104	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen-dokumen yang terealisasi dibagi dengan jumlah dokumen keuangan yang tersusun dikali 100	%	100
105	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/ bln	406
106	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0
107	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2
108	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
109	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1
110	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD yang terpenuhi dibagi jumlah rencana kebutuhan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD dikalikan 100	%	100
111	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0
112	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1
113	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	360
114	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	62
115	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	4

C. Perjanjian Kinerja Perubahan (PK) Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 :

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
Sekretariat DPRD Kota Surakarta

No	Sasaran Srategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema prioritas RKPD	%	57,00%
2	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai SOP	%	60
3	Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien	Nilai Maturitas SPIP	Skor	3,8

Guna mendukung tercapainya sasaran di atas, sesuai dengan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026, Sekretariat DPRD Kota Surakarta didukung dengan program dan anggaran seperti berikut :

Tabel 7. Program Beserta Anggaran di Sekretariat DPRD Kota Surakarta tahun 2024

No	Program	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Sebelum	Setelah	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp 43.119.239.015,00	Rp 45.829.835.071,00	APBD P
2	Progam Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 28.566.588.863,00	Rp 27.073.547.698,00	APBD P

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Setiap capaian kinerja diberi predikat dengan menggunakan pengukuran skala ordinal dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.A. Skala Pengukuran Kinerja

NO	PREDIKAT	NILAI	MEAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sangat Berhasil	$n > 85$	92,5
2	Berhasil	$70 < n \leq 85$	77,5
3	Cukup Berhasil	$55 < n \leq 70$	62,5
4	Kurang dari 55 %	$n \leq 55$	27,5

Pada tahun 2024, Sekretariat DPRD Kota Surakarta telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD dan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2024 dan Rencana Strategis Sekretriat DPRD Kota Surakarta, setidaknya terdapat 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 2 sasaran yang harus diwujudkan pada tahun 2024. Berikut indikator kinerja utama dan indikator kinerja sasaran dari Sekretariat DRPD Kota Surakarta :

Tabel 3.x. Indikator Utama dan Sasaran Sekretariat DRPD Kota Surakarta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Target
1	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif	Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema RKPD	$\frac{\text{aspirasi dalam pokok pikiran DPRD sesuai dengan proritas tema prioriras RKPD th (n)}}{\text{Seluruh aspirasi dalam pokok pikiran DPRD th (n)}} \times 100\%$	57,00%
2	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai SOP		60%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Target
3	Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien	Nilai PMPRB		N/A
		Nilai Maturitas SPIP		3,8

No	Indikator	Satuan	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Tertuang Dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD	%	47,56	N/A	N/A	49,05	64,73	132,0	48,78	54	110,7	57	54,46	95,54
2	Persentase layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai SOP	%	100	100	100	100	100	100,0	100	100	100,0	100	100	100,0
3	Nilai PMPRB	Skor	12,5	12,73	1,02	13,5	25,35	187,8	N/A			N/A		

Tujuan Strategis : Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif

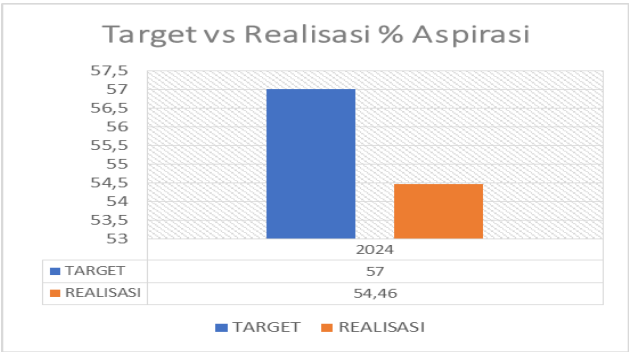
Indikator Kinerja : Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema RKPD Pasal 258 UU No 14 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2018, menyebutkan bahwa Anggota DPD RI berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan Masyarakat. Ketentuan tersebut memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya.

1. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data 2024						Target Kinerja				Capaian Kinerja		
			Target	Rp				Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total 2024		
				TW I	TW II	TW III	TW IV						Realisasi	Capaian (%)	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(26=14,17,20,23)	(27=26:4)	(28)
1	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif	Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema RKPD	57.00	69.192.291.282,00	69.192.291.282,00	74.222.418.165,00	74.222.418.165,00	%	53.00	53.00	57.00	57.00	54.46	95.54	Sangat Berhasil



Gambar xx. Diagram Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema RKPD

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Kinerja indikator kinerja persentase Aspirasi Masyarakat yang Tertuang Dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya trennya selalu mengalami kenaikan. Tampak pada tabel di bawah untuk capain kinerja persentase rumah layak huni dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator	Satuan	2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Tertuang Dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD	%	47,56	47	49,05	61,78	48,78	74,2	57,00	54,64

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD

Performa capaian kinerja dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta hingga tahun 2024 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD untuk indikator Aspirasi Masyarakat yang Tertuang Dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Tabel 3.x. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD
Pada Persentase Aspirasi Masyarakat

NO	INDIKATOR	SATUAN	2021			2022			2023			2024			PREDIKAT
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Tertuang Dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD	%	47,56	47	98,8	49,05	61,78	126	48,78	74,2	152,1	57	54,64	95,85	Sangat Berhasil



Gambar 3.x. Diagram Capaian Kinerja Persentase Aspirasi Masyarakat yang Tertuang Dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Sesuai dengan data di atas nilai % pokok pikiran DPRD mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya dengan penjabaran kenaikan 12,73 % di tahun 2022 dan terjadi pengurangan capaian 2,36 % di tahun 2024. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 ditahun lalu nilai Aspirasi Masyarakat terhitung cukup besar akhirnya menaikan target Capaian Kinerja Aspirasi Masyarakat akan tetapi ternyata realisasi capaian tidak sesuai dengan prediksi yang sudah direncanakan sebab reses untuk tahun 2024 hanya dilakukan 1 kali dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang lama, dan 1 kali dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baru.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Analisis atas keberhasilan dan kegagalan terhadap pencapaian indikator kinerja 1 yaitu persentase rumah layak huni adalah sebagai berikut :

- a. Komitmen dari seluruh pihak yang terlibat dalam penyerapan aspirasi Masyarakat baik dari Sekretariat DPRD, Dewan dan Masyarakat mengenai pentingnya pemahaman tentang prioritas Pembangunan tahun bersangkutan.
- b. Pelaksanaan penyerapan aspirasi yang dilaksanakan sesuai dengan SOP.
- c. Mengutamakan kepentingan Masyarakat di atas kepentingan pribadi perseorangan.
- d. Penyusunan buku kecil/saku sebagai bentuk penyebaran informasi secara detail dan jelas mengenai tema pembangunan Kota Surakarta baik jangka pendek maupun menengah.

Dalam mencapai target kinerja persentase penyerapan aspirasi Masyarakat, masih terdapat kendala-kendala yang dapat berdampak terhadap pencapaian diantaranya adalah :

- a. Belum ratanya pemahaman anggota Dewan dan Masyarakat terhadap tema pembanguna Kota Surakarta, baik RKPD maupun RPJMD.
- b. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap prioritas penyerapan aspirasi masyarakat.
- c. Pemahaman mengenai tema pembangunan hanya terdapat pada kalangan tertentu (tidak diserap pada masyarakat menengah ke bawah).
- d. Belum optimalnya sosialisasi pemerintah mengenai tema pembangunan Kota Surakarta secara detail lengkap.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024, terdapat kegiatan yang terkena *refocusing* anggaran sehingga beberapa aktivitas tidak dapat dilaksanakan, namun tidak berdampak pada capaian kinerja.

Tabel xx. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Output (Satuan)	Anggaran (Rp)			Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
				Sebelum	Sesudah	(Tambah/ Kurang)	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Output (Satuan)	Anggaran (Rp)			Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
				Sebelum	Sesudah	(Tambah/ Kurang)	
1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Belanja Makanan dan Minuman dalam Pelaksanaan Sidak DPRD Kota Surakarta	Orang	7.553.000	7.553.000	0	
2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Orang	64.925.000	11.925.000	(76.850.000)	Ketersediaan kebijakan dan sistem yang mengontrol sinergitas & akuntailitas perencanaan dan penganggaran pembangunan
3	Pelaksanaan Reses	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Orang/ Paket	2.280.000	0	(2.280.000)	
		Belanja Flashdisk	Buah	0	723.000	723.000	
		Belanja Cetak Banner/MMT/Spaduk	Buah	40.625.000	29.250.000	(11.375.000)	
		Belanja Makanan dan Minuman dalam Rangka Persiapan Reses	Orang	7.950.000	7.950.000	0	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat reses	Orang	1.915.950.000	1.915.950.000	5.700.000	
		Belanja Sewa Meja, Kursi, Taplak, dan Perlengkapannya	Unit	214.560.000	288.000.000	73.440.000	
		Belanja Sewa Sound System dan Perlengkapannya	Unit	244.800.000	195.840.000	(48.960.000)	
		Belanja Sewa Tempat untuk pelaksanaan Kegiatan Reses	Hari	213.120.000	213.120.000	0	
		Belanja Tim Pendamping Reses	Orang/ Kegiatan	0	71.220.000	71.220.000	
		Belanja Uang Transport Pengedar Undangan	Orang/ Kegiatan	108.000.000	72.000.000	(36.000.000)	

6. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan

Dalam mewujudkan persentase aspirasi masyarakat yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran DPRD, Sekretariat DPRD Kota Surakarta melakukan pemutakhiran SOP, penyusunan juknis dan sosialisasi ke Dewan dan pegawai Sekretariat DPRD untuk menaikkan *awareness* pihak yang terlibat mengenai aspirasi Masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut di dukung dengan 2 (dua) program, yaitu :

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Dalam upaya memenuhi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD berikut adalah kegiatan Sekretariat DPRD Kota Surakarta :

Dari kegiatan di atas dapat diambil kesimpulan kinerja tugas dan fungsi utama Sekretariat DPRD adalah menyediakan fasilitas untuk terwujudnya pembentukan perda, pengawasan-pengawasan, dan penyerapan aspirasi Masyarakat. Oleh karena itu, untuk memenuhi kegiatan di atas Sekretariat DPRD memberikan usaha terbaik antara lain :

- Melaksanakan kegiatan penyerapan aspirasi Masyarakat melalui kegiatan DKT, reses, ulas, audiensi dan lain sebagainya.



Gambar xx. Kegiatan reses DPRD (1 kali Pertama Jabatan Dewan Baru)

12/18/24, 10:59 AM

FORM ADUJ

ulas

unit layanan aduan surakarta

FORM ADUAN UL

Nomor Aduan	: 2024009902
Tanggal	: 17 Desember 2024
Pengirim	: Afina Luthfiah
Telepon	: 082135770069
Email	: afinal96@gmail.com
Kategori	: Aspirasi Dewan
Media	: Web
Judul Aduan	: Reses
Isi Aduan	: Beberapa kali ikut reses apa, makanan selal terlambat. Memalukan buat dewan yang pur Apa nggak ada evaluasi di DPRD atas vend rekanan? Mohon UMKM dilibatkan supaya ti saja
Lampiran Foto Aduan	: -
Lokasi / Alamat Aduan	:
Jawaban Aduan	:

Gambar xx. Penanganan ulas secara berkala



Gambar xx. Audiensi Penginputan Pokir

- Penguatan website JDIH yang memuat dokumen hukum terpadu dan berkesinambungan yang memuat instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang dapat diakses Masyarakat. Penghargaan JDIH Sekretariat DPRD Kota Surakarta tahun 2024 :



Gambar xx. Penghargaan dari Provinsi Jawa Tengah Terbaik ke V website JDIH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD berikut adalah kegiatan Sekretariat DPRD Kota Surakarta :

No.	Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan untuk administrasi umum yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan untuk administrasi umum yang direncanakan dipenuhi dikalikan 100	Tahun	100
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1

No.	Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	1
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1
12	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan dan Operasional.</i>	%	91,6
13	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0
15	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	80
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5
17	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1
20	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi jumlah asa penunjang urusan pemerintahan yang direncanakan dipenuhi dikalikan 100</i>	%	100
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
23	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12

No.	Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
25	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Sekretariat DPRD yang terpelihara dikali 100	Thn	100
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	13
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0
28	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	20
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	56
30	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	4
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0
34	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terealisasi dibagi dengan dokumen perencanaan penganggaran dikali 100	bulan	100
35	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	2
36	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	2
37	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	2
38	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2
39	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2
40	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	1
41	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4

No.	Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
42	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah realisasi pelaksanaan layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dibagi jumlah rencana pelaksanaan layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dikalikan 100	bulan	100
43	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/ Bulan	45
44	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	paket	2
45	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	45
46	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Jumlah realisasi pelaksanaan layanan Administrasi DPRD dibagi jumlah rencana pelaksanaan layanan Administrasi DPRD dikalikan 100	bulan	100
47	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	1
48	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	laporan	12
49	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12
50	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	12
51	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen-dokumen yang terealisasi dibagi dengan jumlah dokumen keuangan yang tersusun dikali 100	bulan	100
52	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	406
53	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0
54	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2
55	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	1
56	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1
57	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD yang terpenuhi dibagi jumlah rencana kebutuhan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD dikalikan 100	tahun	100
58	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	tahun	0
59	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1

No.	Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
60	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	360
61	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	62
62	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	4

Untuk memenuhi penyerapan aspirasi Masyarakat yang optimal maka diperlukan program penunjang yang baik seperti kegiatan yang tertera pada table di atas. Pada tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Surakarta mendapatkan penghargaan dari program penunjang antara lain :



Gambar xx. Juara I Pengelolaan Arsip Terbaik se Kota Surakarta



Gambar xx. Juara III Laporan Keuangan Kategori Perangkat Daerah Instansi Besar

Dalam mendukung pencapaian atas indikator kinerja utama (IKU), Sekretariat DPRD Kota Surakarta telah menetapkan 2 sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD sebagai organisasi pendukung kinerja DPRD dan anggotanya dalam kedudukannya sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD, berdasarkan tugas dan fungsi yang diembannya membutuhkan perhatian sangat besar pada pentingnya peningkatan kapasitas pegawai dan kemampuan pelayanan untuk mewujudkan kinerja sekretariat yang optimal mengingat sangat kompleksnya tugas dan fungsi DPRD maka hubungan kerja Sekretariat DPRD dan anggota DPRD harus terpelihara dengan baik, agar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Sekretariat DPRD dapat berjalan lancar, karena Sekretariat DPRD merupakan sarana agar DPRD dapat menunjukkan kinerja yang baik. Untuk menjalankan kinerja yang tertata maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terukur dan termutakhirkan mengikuti perkembangan era dan lingkungan ksektariatian.

1. Progres Capaian antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian indikator sasaran 1 yaitu Persentase layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai SOP berhasil melampaui target secara keseluruhan. Walaupun pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP masih cukup sulit dilakukan dikarenakan jumlah pegawai yang masih sangat terbatas, namun pelayanan sesuai SOP tetap dilakukan.

Tabel 3.x. Progres Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Data 2024						Target Kinerja				Capaian Kinerja														
		Target	Rp				Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW II			TW III			TW IV			Total 2024		
			TW I	TW II	TW III	TW IV						Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15=14:10)	(16)	(17)	(18=17:11)	(19)	(20)	(21=20:12)	(22)	(23)	(24=23:13)	(25)	(26=14,17,20,23)	(27=26:4)	(28)
1	Persentase layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai SOP	60	42.229.914.315,00	42.229.914.315,00	44.550.430.410,00	44.550.430.410,00	%	60,00	60,00	60,00	60,00	58,00	96,67	Sangat Berhasil	58,00	96,67	Sangat Berhasil	58,00	96,67	Sangat Berhasil	58,00	96,67	Sangat Berhasil	58,00	96,67	Sangat Berhasil

Tampak dari diagram di atas bahwa layanan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD sesuai SOP mengalami kenaikan tiap triwulannya dan telah mencapai target yang ditetapkan.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan target dan realisasi kinerja layanan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD sesuai SOP beberapa tahun terakhir yaitu sebagai berikut :

No	Indikator	Satuan	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai SOP	%	57	60	105,3	58	65	112,1	60	58	Sangat Berhasil

Tabel 3.x. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Persentase layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai SOP

Dari table di atas dapat diambil kesimpulan bahwa capaian indicator persentase layanan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD sesuai SOP mengalami kenaikan dari tahun ke tahun mengingat SOP Sekretariat DPRD Kota Surakarta sudah di mutakhirkan di tahun 2022 semenjak tahun 2017.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD

Performa capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Surakarta hingga tahun 2024 sudah cukup baik. Realisasi kinerja dari sasaran ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan target akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.x. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD Pada Indikator Kinerja

Sasaran 1

No	Indikator	Satuan	2022			2023			2024			Target Akhir RPJMD 2026	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1	Persentase layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai SOP	%	57	60	105,3	58	65	112,1	60	58	Sangat Berhasil	56,86	92,31

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Adapun faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian pada sasaran ini adalah sebagai berikut :

Faktor pendorong kinerja :

- Pemutakhiran SOP Sekretariat DPRD yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi
- Sosialisasi SOP secara intensif ke seluruh pegawai dan DPRD
- Pemahaman yang mumpuni masing-masing tugas dan fungsi jabatan

Faktor penghambat kinerja :

- Pemahaman mengenai Tusi dan SOP belum merata
- Kualitas SDM yang belum optimal dan merata
- Jumlah pegawai yang masih terbatas di kalangan ASN

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024, terdapat kegiatan yang terkena refocusing anggaran sehingga beberapa aktivitas tidak dapat dilaksanakan, namun tidak berdampak pada capaian kinerja.

Tabel xxx. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program	Aktivitas	Anggaran		
			Sebelum	Sesudah	(Tambah/Kurang)
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	33.764.000	29.204.000	- 4.560.000
2		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.832.568.000	3.917.255.320	84.687.320
3		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	846.224.000	0	- 846.224.000

No	Program	Aktivitas	Anggaran		
			Sebelum	Sesudah	(Tambah/Kurang)
4		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	305.725.000	303.445.000	- 2.280.000
5		Penyusunan Tata Tertib DPRD	273.370.000	18.775.000	- 254.595.000
6	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS	189.750.000	309.750.000	120.000.000
7		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	189.750.000	189.750.000	0
8		Pembahasan APBD	362.580.000	615.535.500	252.955.500
9		Pembahasan APBD Perubahan	360.255.000	335.535.500	- 24.719.500
11		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	325.030.000	472.391.000	147.361.000
12	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang dan Hukum	1.191.783.190	1.717.739.000	525.955.810
13		Pengawasan Urusan Bidang Infrastruktur	1.191.783.190	1.722.757.000	530.973.810
14		Pengawasan Urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.191.783.190	1.704.718.000	512.934.810
15		Pengawasan Urusan Bidang Perekonomian	1.191.783.190	1.501.786.000	310.002.810
16		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2.650.000	2.650.000	0
17		Pengawasan Penggunaan Anggaran	600.000.000	1.224726.000	624.726.000
18		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	311.427.000	459.302.000	147.875.000
19	Peningkatan Kapasitas DPRD	Orientasi DPRD	484.989.000	502.500.000	17.511.000
20		Pendalaman Tugas DPRD	3.108.154.000	2.591.957.000	- 516.197.000
22		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	186.000.000	200.000.000	14.000.000
23		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	161.184.800	159.488.000	- 1.696.800
24		Penyusunan Program Kerja DPRD	339.344.000	342.084.000	2.740.000
25		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.117.242.550	1.243.581.800	126.339.250
26	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kunjungan Kerja dalam Daerah	7.553.000	7.553.000	0
27		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	64.925.000	11.925.000	- 53.000.000
28		Pelaksanaan Reses	2.766.335.000	2.786.103.800	19.045.000

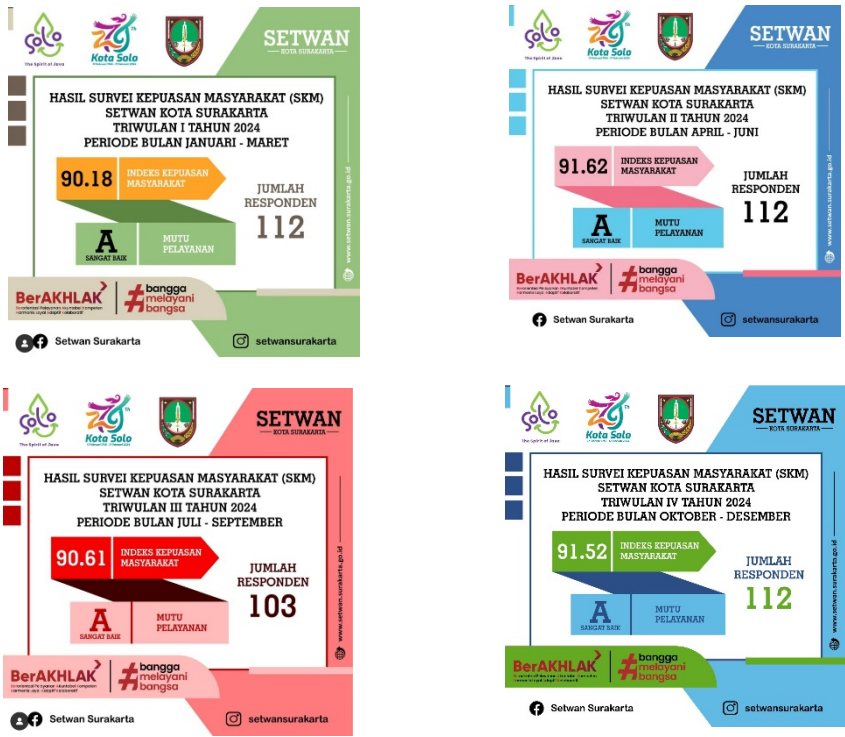
No	Program	Aktivitas	Anggaran		
			Sebelum	Sesudah	(Tambah/Kurang)
29	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD	4.134.000	4.134.000	0
30		Pengawasan Kode Etik DPRD	4.134.000	4.134.000	0
31	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	5.035.000	5.035.000	0
32		Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	5.035.000	5.035.000	0
33	Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	7.172.352.223	6.193.060.762	- 979.291.461
34		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	32.395.000	50.205.000	17.810.000
35		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	51.039.000	51.039.000	0
36		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	664.956.740	998.002.073	333.045.333

6. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan

Dalam mendukung capaian target kinerja indikator 1 persentase layanan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD sesuai SOP Sekretariat DPRD di dukung 1 Program, yaitu :

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Dalam rangka memfasilitasi tugas dan fungsiDPRD sesuai dengan SOP Sekretariat DPRD berusaha memberikan pelayanan yang optimal untuk Masyarakat yang di dukung melalui survey kepuasan Masyarakat per tiwulannya dengan capaian sebagai berikut :



Gambar xx. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2024

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 mengamanatkan bahwa pendayagunaan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assessement*) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen: Pengungkit (Enablers) dan Hasil (Results). Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan.

Hasil dari penilaian PMPRB Sekretariat DPRD Kota Surakarta pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

Tabel xx. Ukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kualitas kinerja dan keefektifan perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien	Nilai Maturitas Kelembagaan	44	50	113,7

1. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel xx. Ukuran Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Data 2024	Target Kinerja				Capaian Kinerja														
	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW II			TW III			TW IV			Total 2024		
						Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
Nilai Maturitas Kelembagaan	nilai	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	100	Sangat Berhasil	48.00	100	Sangat Berhasil	48.00	100	Sangat Berhasil	48.00	100	Sangat Berhasil	48.00	100	Sangat Berhasil

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terakhir dilaksanakan pada tahun 2022, sehingga untuk realisasi kinerja pada tahun 2024 ini masih menggunakan penilaian di tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, nilai PMPRB diganti dengan nama nilai Maturitas Kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Surakarta masih melampaui target yang diberikan seperti tampak pada table dibawah ini :

Tabel 3.x. Perbandingan Nilai PMPRB dan Nilai Maturitas Kelembagaan dari tahun sebelumnya

No	Indikator	Satuan	2022			2023			2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Nilai PMPRB	Skor	13,5	25,35	187,8	13,5	25,35	187,8	N/A			
2	Nilai Maturitas Kelembagaan	Skor	N/A			N/A			44	48	109,1	Sangat Berhasil

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) terakhir dilaksanakan pada tahun 2022, sehingga untuk realisasi kinerja pada tahun 2023 ini masih menggunakan penilaian di tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2026, nilai PMPRB Sekretariat DPRD Kota Surakarta masih melampaui target yang diberikan seperti tampak pada table dibawah ini :

Tabel 3.x. Perbandingan Nilai PMPRB dengan Target RPJMD

No	Indikator	Satuan	2021			2022			2023				Tahun 2026 (Akhir RPJMD)	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Predikat	Target	Capaian
1	Nilai PMPRB	Skor	N/A			13,5	25,35	187,8	13,5	25,35	187,8	Sangat Berhasil	15,5	163,5

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Analisis atas keberhasilan dan kegagalan terhadap pencapaian indikator sasaran yaitu nilai PMPRB adalah sebagai berikut :

Faktor pendorong kinerja :

- Kelengkapan bank data organisasi
- Komitmen pimpinan perangkat daerah beserta seluruh jajarannya dalam menjalankan proses reformasi birokrasi guna meningkatkan kompetensi pegawai serta pelayanan kepada masyarakat
- Sosialisasi pengisian dan cara penilaian Maturitas Kelembagaan yang jelas

Faktor penghambat kinerja :

- Data yang kurang lengkap atau tidak tersip secara baik

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel xxx. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program	Aktivitas	Anggaran		
			Sebelum	Sesudah	(Tambah/ Kurang)
50	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP berdasarkan perhitungan SAKIP sesuai dengan peraturan perundangan			

No	Program	Aktivitas	Anggaran		
			Sebelum	Sesudah	(Tambah/ Kurang)
51		Nilai SKM berdasarkan perhitungan SKM sesuai dengan peraturan perundangan			-
52		Nilai Maturitas Kelembagaan berdasarkan perhitungan Maturitas Kelembagaan sesuai dengan peraturan perundangan			-
53		Nilai SPIP berdasarkan perhitungan SPIP sesuai dengan peraturan perundangan			-
54	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan untuk administrasi umum yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan untuk administrasi umum yang direncanakan dipenuhi dikalikan 100			
55	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	46.101.480	46.101.480	0
56	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	391.689.115	416.574.565	15.800.250
57	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	452.048.000	390.675.931	- 61.372.069
58	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	740.008.800	840.074.800	100.066.000
59	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	534.905.271	605.301.423	70.396.423
60	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	62.794.198	56.434.338	- 6.359.860
61	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	383.696.900	474.341.900	90.945.000
62	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	425.450.000	495.287.153	69.837.153
63	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.722.200	191.322.200	170.600.000
65	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan dan Operasional.			
68	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	206.760.000	510.049.984	303.289.984
69	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	217.801.400	170.570.600	- 47.230.800
71	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	458.558.100	149.107.900	- 309.450.200

No	Program	Aktivitas	Anggaran		
			Sebelum	Sesudah	(Tambah/ Kurang)
73	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi jumlah asa penunjang urusan pemerintahan yang direncanakan dipenuhi dikalikan 100			
74	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63.674.000	63.674.000	0
75	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.029.006.400	1.029.006.400	0
77	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3.851.804.857	3.958.304.857	106.500.000
78	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Sekretariat DPRD yang terpelihara dikali 100			
79	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	856.535.000	775.082.000	- 91.453.000
81	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	22.500.000	22.500.000	0
82	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99.240.000	459.240.000	360.000.000
84	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	625.970.400	521.575.200	- 104.395.200
85	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	109.610.400	119.610.400	10.000.000
87	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terealisasi dibagi dengan dokumen perencanaan penganggaran dikali 100			
88	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	107.458.279	79.729.046	- 27.729.233
89	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.717.378	9.717.378	0
90	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.215.378	13.215.378	0
91	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	22.067.000	14.937.000	- 7.130.000
92	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.467.130	12.716.614	9.249.484

No	Program	Aktivitas	Anggaran		
			Sebelum	Sesudah	(Tambah/ Kurang)
93	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.541.376	22.273.424	10.732.048
94	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.940.747	19.008.087	8.067.340
95	<i>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>	<i>Jumlah realisasi pelaksanaan layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dibagi jumlah rencana pelaksanaan layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dikalikan 100</i>			
96	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25.234.378.600	25.234.378.600	
97	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	611.318.500	939.425.500	328.107.000
98	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	157.248.000	146.520.000	- 10.728.000
99	<i>Kegiatan Layanan Administrasi DPRD</i>	<i>Jumlah realisasi pelaksanaan layanan Administrasi DPRD dibagi jumlah rencana pelaksanaan layanan Administrasi DPRD dikalikan 100</i>			
101	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	29.680.000	61.480.000	31.800.000
103	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1.051.032.900	1.195.383.500	144.350.600
104	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen-dokumen yang terealisasi dibagi dengan jumlah dokumen keuangan yang tersusun dikali 100</i>			
105	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.238.607.274	4.436.032326	197.425.052
107	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.187.092	11.273.888	8.091.796
108	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21.212..738	23.479.538	2.266.800
110	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah kebutuhan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD yang terpenuhi dibagi jumlah rencana kebutuhan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD dikalikan 100</i>			
112	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	174.060.000	302.340.000	128.280.000
114	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	676.022.000	676.022.000	0

No	Program	Aktivitas	Anggaran		
			Sebelum	Sesudah	(Tambah/ Kurang)
115	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	126.127.902	57.663.000	- 68.464.902

6. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan

Program yang mendukung Sasaran 3: Meningkatnya kualitas kinerja dan keefektifan perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien adalah :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Surakarta dimana terdapat 4 indikator didalamnya yaitu :

Tabel 3.xx. Indikator Program Urusan Penunjang

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai SAKIP	Nilai	67,0	77,31	115,3
2	Nilai SKM	Nilai	86,0	91,89	106,8
3	Nilai Maturitas Kelembagaan	Nilai	44,0	50	113,6
4	Nilai SPIP	Nilai	3,8	3,98	104,7

Seperti tampak pada tabel di atas, 3 indikator telah berhasil mencapai target di atas 100% sedangkan nilai SPIP masih di bawah target. Target indikator nilai SPIP perlu dilakukan revisi dikarenakan indeks nilai SPIP Pemerintah Kota Surakarta berada di angka 3,3 secara rata-rata. Walaupun belum mencapai 100%, nilai SPIP Sekretariat DPRD Kota Surakarta masih dalam kategori baik jika dibandingkan rata-rata Pemerintah Kota Surakarta. Dalam mencapai target tersebut, Sekretariat DPRD Kota Surakarta melaksanakan kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.x. Diskusi Kelompok Terbatas Rencana Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Surakarta



Gambar 3.x.

Foto Kegiatan Penandatanganan Netralitas ASN

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis terhadap penyebab keberhasilan, kegagalan dan solusi setiap Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Surakarta tahun 2024 tersaji sebagai berikut :

Tabel 3.9. Analisa Keberhasilan/Kegagalan Kinerja pada Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Analisa Kerberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Tertuang Dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD	%	48,78	74,2	152,1	<ul style="list-style-type: none">- Komitmen dari seluruh pihak yang terlibat dalam penyerapan aspirasi Masyarakat baik dari Sekretariat DPRD, Dewan dan Masyarakat mengenai pentingnya pemahaman tentang prioritas Pembangunan tahun bersangkutan.- Pelaksanaan penyerapan aspirasi yang dilaksanakan sesuai dengan SOP.- Mengutamakan kepentingan Masyarakat di atas kepentingan pribadi perseorangan.- Penyusunan buku kecil/saku sebagai bentuk penyebaran informasi secara detail dan jelas mengenai tema pembangunan Kota Surakarta baik jangka pendek maupun menengah.- Belum ratanya pemahaman anggota Dewan dan Masyarakat terhadap tema pembanguna Kota Surakarta, baik RKPd maupun RPJMD.- Kurangnya pemahaman perhatian pemerintah terhadap prioritas penyerapan aspirasi masyarakat.- Pemahaman mengenai tema pembangunan hanya terdapat pada kalangan tertentu (tidak diserap pada masyarakat menengah ke bawah).- Belum optimalnya sosialisasi pemerintah mengenai tema pembangunan Kota Surakarta secara detail lengkap.	Sosialisasi yang intensif untuk pemahaman yang lebih optimal mengenai tema pembangunan Kota Surakarta
2	Persentase layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai SOP	%	58	65	112,1	<ul style="list-style-type: none">- Pemutakhiran SOP Sekretariat DPRD yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi- Sosialisasi SOP secara intensif ke seluruh pegawai dan DPRD- Pemahaman yang mumpuni masing-masing tugas dan fungsi jabatan- Pemahaman mengenai Tusi dan SOP DPRD belum merata- Kualitas SDM yang belum optimal dan merata- Jumlah pegawai yang masih terbatas di kalangan ASN	peningkatan kapasitas pegawai melalui Bimbingan Teknis
4	Nilai Maturitas Kelembagaan	nilai	44	48	109,0	<ul style="list-style-type: none">- Kelengkapan bank data organisasi- Komitmen pimpinan perangkat daerah beserta seluruh jajarannya dalam menjalankan proses reformasi birokrasi guna meningkatkan kompetensi pegawai serta pelayanan kepada masyarakat- Sosialisasi pengisian dan cara penilaian matriks PMPRB yang jelas- Data yang kurang lengkap atau tidak tersip secara baik	Sosialisasi yang jelas mengenai penilaian Maturitas Kelembagaan

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Surakarta, pada tahun anggaran 2024, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 74.222.418.165,-. Anggaran tersebut bersumber dari APBD-P dengan rincian sebagai berikut :

Tabel xxx. Rincian Belanja Sekretariat DPRD Kota Surakarta

Uraian	Anggaran
BELANJA OPERASI	73.435.689.681
Belanja Pegawai	29.670.410.926
Belanja Barang dan Jasa	43.765.278.755
BELANJA MODAL	786.728.484
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	786.728.484
JUMLAH BELANJA	74.222.418.165

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11. Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Anggaran		Realisasi
		Sebelum	Setelah	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp107.458.279,00	Rp79.729.046,00	68.655.750
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp9.717.378,00	Rp9.717.378,00	7.762.625
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Rp13.215.378,00	Rp13.215.378,00	10.419.400
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Rp22.067.000,00	Rp14.937.000,00	11.823.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Rp3.467.130,00	Rp12.716.614,00	10.592.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp11.541.376,00	Rp22.273.424,00	22.188.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp10.940.747,00	Rp19.008.087,00	17.982.600
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp4.263.002.104,00	Rp4.470.785.752,00	4.111.127.123
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp4.238.607.274,00	Rp4.436.032.326,00	4.078.496.123
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp3.182.092,00	Rp11.273.888,00	10.000.000
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp21.212.738,00	Rp23.479.538,00	22.631.000
12	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp976.209.902,00	Rp1.036.025.000,00	378.653.257
13	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp174.060.000,00	Rp302.340.000,00	278.679.900

14	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp126.127.902,00	Rp57.663.000,00	49.946.725
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Rp676.022.000,00	Rp676.022.000,00	50.026.632
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp3.057.415.964,00	Rp3.506.113.790,00	2.921.384.238
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp46.101.480,00	Rp46.101.480,00	39.083.000
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp391.689.115,00	Rp416.574.565,00	409.001.636
19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp452.048.000,00	Rp390.675.931,00	271.243.142
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp740.008.800,00	Rp840.074.800,00	738.518.120
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Rp534.905.271,00	Rp605.301.423,00	488.466.625
22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Rp62.794.198,00	Rp56.434.338,00	25.302.400
23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp383.696.900,00	Rp474.341.900,00	267.925.000
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp425.450.000,00	Rp495.287.153,00	494.903.637
25	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp20.722.200,00	Rp181.322.200,00	186.940.678
26	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp2.880.000,00	Rp53.000.000,00	811.854.700
27	Pengadaan Mebel	Rp680.000,00	Rp25.000.000,00	509.184.700
28	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp680.000,00	Rp28.000.000,00	161.120.000
29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp1.520.000,00	Rp0,00	141.550.000
30	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp4.944.485.257,00	Rp5.050.985.257,00	4.711.923.978
31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp63.674.000,00	Rp63.674.000,00	41.650.000
32	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp1.029.006.400,00	Rp1.029.006.400,00	828.346.344
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp3.851.804.857,00	Rp3.958.304.857,00	3.841.927.634
34	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.723.855.800,00	Rp1.898.007.600,00	1.667.345.614
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp866.535.000,00	Rp775.082.000,00	704.351.969
36	Pemeliharaan Mebel	Rp22.500.000,00	Rp22.500.000,00	9.900.000
37	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp99.240.000,00	Rp459.240.000,00	347.584.500
38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp625.970.400,00	Rp521.575.200,00	513.819.145
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp109.610.400,00	Rp119.610.400,00	91.690.000

40	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp26.002.945.100,00	Rp26.320.324.100,00	25.649.308.253
41	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp25.234.378.600,00	Rp25.234.378.600,00	24.728.996.053
42	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp611.318.500,00	Rp939.425.500,00	818.293.000
43	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp157.248.000,00	Rp146.520.000,00	102.019.200
44	Layanan Administrasi DPRD	Rp1.080.712.900,00	Rp1.256.863.500,00	1.113.411.935
45	Fasilitasi Fraksi DPRD	Rp29.680.000,00	Rp61.480.000,00	31.041.000
46	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Rp1.051.032.900,00	Rp1.195.383.500,00	1.082.370.935
47	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp28.565.865.073,00	Rp29.671.987.755,00	
48	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp5.291.651.000,00	Rp4.268.679.320,00	2.971.997.551
49	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp33.764.000,00	Rp29.204.000,00	22.932.000
50	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp3.832.568.000,00	Rp3.917.255.320,00	2.786.089.281
51	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Rp846.224.000,00	Rp0,00	-
52	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Rp305.725.000,00	Rp303.445.000,00	149.025.270
53	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Rp273.370.000,00	Rp18.775.000,00	13.951.000
54	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp1.427.365.000,00	Rp1.922.962.000,00	1.113.125.580
55	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp189.750.000,00	Rp309.750.000,00	-
56	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp189.750.000,00	Rp189.750.000,00	178.013.000
57	Pembahasan APBD	Rp362.580.000,00	Rp615.535.500,00	207.405.012
58	Pembahasan APBD Perubahan	Rp360.255.000,00	Rp335.535.500,00	258.437.629
59	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp325.030.000,00	Rp472.391.000,00	469.269.939
60	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp5.681.209.760,00	Rp8.333.678.000,00	4.975.495.942
61	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Rp1.191.783.190,00	Rp1.717.739.000,00	1.091.611.440
62	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rp1.191.783.190,00	Rp1.722.757.000,00	993.206.445
63	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp1.191.783.190,00	Rp1.704.718.000,00	1.065.800.506
64	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rp1.191.783.190,00	Rp1.501.786.000,00	988.508.551
65	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Rp2.650.000,00	Rp2.650.000,00	-

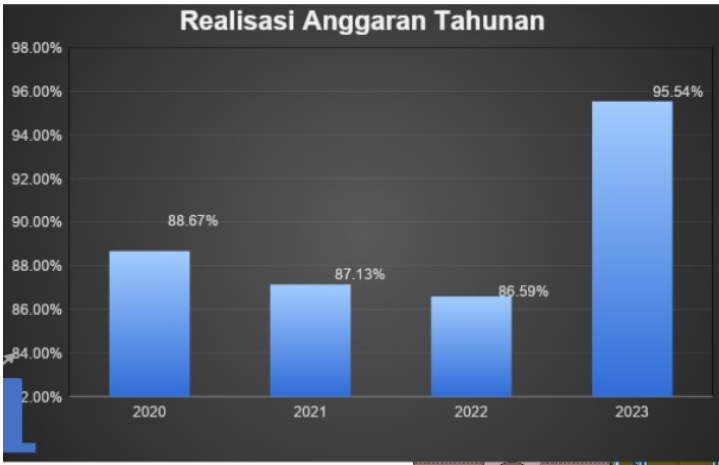
66	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Rp600.000.000,00	Rp1.224.726.000,00	388.547.000
67	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rp311.427.000,00	Rp459.302.000,00	447.822.000
68	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp5.396.914.350,00	Rp5.039.610.800,00	3.814.360.642
69	Orientasi DPRD	Rp484.989.000,00	Rp502.500.000,00	384.541.500
70	Pendalaman Tugas DPRD	Rp3.108.154.000,00	Rp2.591.957.000,00	1.753.387.052
71	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rp186.000.000,00	Rp200.000.000,00	198.000.000
72	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Rp161.184.800,00	Rp159.488.000,00	152.976.000
73	Penyusunan Program Kerja DPRD	Rp339.344.000,00	Rp342.084.000,00	153.473.620
74	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Rp1.117.242.550,00	Rp1.243.581.800,00	1.171.982.470
75	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp2.838.813.000,00	Rp2.805.581.800,00	2.422.968.000
76	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Rp7.553.000,00	Rp7.553.000,00	-
77	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rp64.925.000,00	Rp11.925.000,00	4.558.000
78	Pelaksanaan Reses	Rp2.766.335.000,00	Rp2.786.103.800,00	2.418.410.000
79	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp4.134.000,00	Rp4.134.000,00	530.000
80	Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp4.134.000,00	Rp4.134.000,00	530.000
81	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Rp5.035.000,00	Rp5.035.000,00	-
82	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Rp5.035.000,00	Rp5.035.000,00	-
83	Fasilitasi Tugas DPRD	Rp7.920.742.963,00	Rp7.292.306.835,00	5.681.308.608
84	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp7.172.352.223,00	Rp6.193.060.762,00	4.652.704.657
85	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Rp32.395.000,00	Rp50.205.000,00	12.404.000
86	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Rp51.039.000,00	Rp51.039.000,00	28.196.000
87	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Rp664.956.740,00	Rp998.002.073,00	988.003.951
	TOTAL	Rp70.795.779.388,00	Rp73.435.689.681,00	Rp62.494.218.796,00

Berdasarkan realisasi anggaran tahun 2024, Sekretariat DPRD Kota Surakarta sebesar 84,41%, jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar 95,54% maka serapan anggaran mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat yang baru menyebabkan 1. Belum Ada Kesepakatan Antar Fraksi: Proses pembentukan alat kelengkapan DPRD seperti

komisi, badan anggaran, badan kehormatan, dan lainnya memerlukan kesepakatan antar fraksi. Jika fraksi-fraksi belum mencapai kesepakatan terkait komposisi atau siapa yang akan menduduki posisi tertentu, maka pembentukan bisa tertunda.

2. Keterlambatan dalam Pengambilan Keputusan: Kadang, proses administrasi atau birokrasi internal di DPRD bisa memperlambat pembentukan alat kelengkapan. Misalnya, waktu yang diperlukan untuk menyusun aturan tata tertib baru atau pemilihan pimpinan bisa menyebabkan penundaan.

3. Masalah Teknis atau Administratif: Terkadang, kendala teknis seperti perubahan jadwal rapat, atau administratif, seperti keterlambatan penyerahan dokumen, juga bisa menyebabkan alat-alat kelengkapan belum terbentuk tepat waktu. Keterlambatan pembentukan alat kelengkapan ini bisa berdampak pada efektivitas dan kinerja DPRD dalam menjalankan fungsinya, termasuk pembuatan kebijakan, pengawasan, dan penganggaran. Realisasi anggaran dari tahun ke tahun dapat di lihat pada diagram berikut :



Gambar xxx. Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2020-2023

C. Pencapaian Lainnya

Pada tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Surakarta belum memiliki pencapaian yang lain, namun banyak mengikuti kegiatan-kegiatan pemerintah Kota Surakarta seperti gambar di bawah ini :



Gambar xxx. Pawai Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan capaian kinerja pada indikator kinerja maupun indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022 – 2026 Sekretariat DPRD, maka dapat dikatakan bahwa Sekretariat DPRD pada tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya telah berhasil melampaui dari target yang telah ditetapkan.

1. Capaian Tahun 2024

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Surakarta tergolong dalam predikat **sangat berhasil** karena rata-rata capaian kerjanya adalah 107,0 %.

Tabel 4.1. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Predikat
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Tertuang Dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD	%	57	54,46	95,54	SANGAT BERHASIL
2	Persentase layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai SOP	%	60	58	96,67	SANGAT BERHASIL
3	Nilai Maturitas Kelembagaan	%	44	50	113,6	SANGAT BERHASIL
	RATA-RATA				101,9	SANGAT BERHASIL

2. Faktor Pendorong dan Penghambat

Hal yang mendasari atas keberhasilan atas capaian kinerja dari Sekretariat DPRD adalah:

- a. Tercapainya persentase aspirasi masyarakat yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran DPRD karena adanya komitmen dari seluruh pihak yang terlibat dalam penyerapan aspirasi Masyarakat baik dari Sekretariat DPRD, Dewan dan Masyarakat mengenai pentingnya pemahaman tentang prioritas Pembangunan tahun bersangkutan.
- b. Tercapainya persentase layanan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD sesuai SOP karena SOP yang termutakhirkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- c. Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah berupa peningkatan mutu layanan kepada masyarakat yang efektif dan efesien dengan meningkatnya nilai PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi).

Adapun faktor yang menghambat kinerja adalah :

- a. Belum ratanya pemahaman anggota Dewan dan Masyarakat terhadap tema pembanguna Kota Surakarta, baik RKPD maupun RPJMD.

- b. Pemahaman mengenai Tusi dan SOP belum merata.
- c. Data yang kurang lengkap atau tidak tersip secara baik.

3. Total Anggaran Tahun 2024

Guna mendukung capaian kinerja, pada tahun 2024 anggaran Sekretariat DPRD Kota Surakarta apabila dibandingkan mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.536.590.277. dengan program/kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 4.2. Rekapitulasi Anggaran Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Anggaran		(Tambah/Kurang)
		Sebelum	Setelah	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp107.458.279,00	Rp79.729.046,00	- 27.729.233
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp9.717.378,00	Rp9.717.378,00	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Rp13.215.378,00	Rp13.215.378,00	-
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Rp22.067.000,00	Rp14.937.000,00	- 7.130.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Rp3.467.130,00	Rp12.716.614,00	9.249.484
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp11.541.376,00	Rp22.273.424,00	10.732.048
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp10.940.747,00	Rp19.008.087,00	8.067.340
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp4.263.002.104,00	Rp4.470.785.752,00	207.783.648
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp4.238.607.274,00	Rp4.436.032.326,00	197.425.052
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp3.182.092,00	Rp11.273.888,00	8.091.796
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp21.212.738,00	Rp23.479.538,00	2.266.800
12	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp976.209.902,00	Rp1.036.025.000,00	59.815.098
13	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp174.060.000,00	Rp302.340.000,00	128.280.000
14	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp126.127.902,00	Rp57.663.000,00	- 68.464.902
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Rp676.022.000,00	Rp676.022.000,00	-
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp3.057.415.964,00	Rp3.506.113.790,00	448.697.826
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp46.101.480,00	Rp46.101.480,00	-
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp391.689.115,00	Rp416.574.565,00	24.885.450
19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp452.048.000,00	Rp390.675.931,00	- 61.372.069
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp740.008.800,00	Rp840.074.800,00	100.066.000

21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp534.905.271,00	Rp605.301.423,00	70.396.152
22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Rp62.794.198,00	Rp56.434.338,00	- 6.359.860
23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp383.696.900,00	Rp474.341.900,00	90.645.000
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp425.450.000,00	Rp495.287.153,00	69.837.153
25	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp20.722.200,00	Rp181.322.200,00	160.600.000
26	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp2.880.000,00	Rp53.000.000,00	50.120.000
27	Pengadaan Mebel	Rp680.000,00	Rp25.000.000,00	24.320.000
28	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp680.000,00	Rp28.000.000,00	27.320.000
29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp1.520.000,00	Rp0,00	- 1.520.000
30	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp4.944.485.257,00	Rp5.050.985.257,00	106.500.000
31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp63.674.000,00	Rp63.674.000,00	-
32	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp1.029.006.400,00	Rp1.029.006.400,00	-
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp3.851.804.857,00	Rp3.958.304.857,00	106.500.000
34	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.723.855.800,00	Rp1.898.007.600,00	174.151.800
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp866.535.000,00	Rp775.082.000,00	- 91.453.000
36	Pemeliharaan Mebel	Rp22.500.000,00	Rp22.500.000,00	-
37	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp99.240.000,00	Rp459.240.000,00	360.000.000
38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp625.970.400,00	Rp521.575.200,00	- 104.395.200
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp109.610.400,00	Rp119.610.400,00	10.000.000
40	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp26.002.945.100,00	Rp26.320.324.100,00	317.379.000
41	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp25.234.378.600,00	Rp25.234.378.600,00	-
42	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp611.318.500,00	Rp939.425.500,00	328.107.000
43	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp157.248.000,00	Rp146.520.000,00	- 10.728.000
44	Layanan Administrasi DPRD	Rp1.080.712.900,00	Rp1.256.863.500,00	176.150.600
45	Fasilitasi Fraksi DPRD	Rp29.680.000,00	Rp61.480.000,00	31.800.000

46	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Rp1.051.032.900,00	Rp1.195.383.500,00	144.350.600
47	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp28.565.865.073,00	Rp29.671.987.755,00	1.106.122.682
48	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp5.291.651.000,00	Rp4.268.679.320,00	- 1.022.971.680
49	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp33.764.000,00	Rp29.204.000,00	- 4.560.000
50	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp3.832.568.000,00	Rp3.917.255.320,00	84.687.320
51	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Rp846.224.000,00	Rp0,00	- 846.224.000
52	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Rp305.725.000,00	Rp303.445.000,00	- 2.280.000
53	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Rp273.370.000,00	Rp18.775.000,00	- 254.595.000
54	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp1.427.365.000,00	Rp1.922.962.000,00	495.597.000
55	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp189.750.000,00	Rp309.750.000,00	120.000.000
56	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp189.750.000,00	Rp189.750.000,00	-
57	Pembahasan APBD	Rp362.580.000,00	Rp615.535.500,00	252.955.500
58	Pembahasan APBD Perubahan	Rp360.255.000,00	Rp335.535.500,00	- 24.719.500
59	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp325.030.000,00	Rp472.391.000,00	147.361.000
60	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp5.681.209.760,00	Rp8.333.678.000,00	2.652.468.240
61	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Rp1.191.783.190,00	Rp1.717.739.000,00	525.955.810
62	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rp1.191.783.190,00	Rp1.722.757.000,00	530.973.810
63	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp1.191.783.190,00	Rp1.704.718.000,00	512.934.810
64	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rp1.191.783.190,00	Rp1.501.786.000,00	310.002.810
65	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Rp2.650.000,00	Rp2.650.000,00	-
66	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Rp600.000.000,00	Rp1.224.726.000,00	624.726.000
67	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rp311.427.000,00	Rp459.302.000,00	147.875.000
68	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp5.396.914.350,00	Rp5.039.610.800,00	- 357.303.550
69	Orientasi DPRD	Rp484.989.000,00	Rp502.500.000,00	17.511.000
70	Pendalaman Tugas DPRD	Rp3.108.154.000,00	Rp2.591.957.000,00	- 516.197.000
71	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rp186.000.000,00	Rp200.000.000,00	14.000.000

72	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Rp161.184.800,00	Rp159.488.000,00	-	1.696.800
73	Penyusunan Program Kerja DPRD	Rp339.344.000,00	Rp342.084.000,00		2.740.000
74	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Rp1.117.242.550,00	Rp1.243.581.800,00		126.339.250
75	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp2.838.813.000,00	Rp2.805.581.800,00	-	33.231.200
76	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Rp7.553.000,00	Rp7.553.000,00		-
77	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rp64.925.000,00	Rp11.925.000,00	-	53.000.000
78	Pelaksanaan Reses	Rp2.766.335.000,00	Rp2.786.103.800,00		19.768.800
79	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp4.134.000,00	Rp4.134.000,00		-
80	Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp4.134.000,00	Rp4.134.000,00		-
81	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Rp5.035.000,00	Rp5.035.000,00		-
82	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Rp5.035.000,00	Rp5.035.000,00		-
83	Fasilitasi Tugas DPRD	Rp7.920.742.963,00	Rp7.292.306.835,00	-	628.436.128
84	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp7.172.352.223,00	Rp6.193.060.762,00	-	979.291.461
85	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Rp32.395.000,00	Rp50.205.000,00		17.810.000
86	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Rp51.039.000,00	Rp51.039.000,00		-
87	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Rp664.956.740,00	Rp998.002.073,00		333.045.333
	TOTAL	Rp70.795.779.388,00	Rp73.435.689.681,00		Rp2.639.910.293,00

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Surakarta di masa mendatang antara lain:

1. Layanan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD (Bagian Umum dan Keuangan) yang sesuai SOP perlu dioptimalkan;
2. Layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi sesuai SOP perlu dioptimalkan;
3. Layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan sesuai SOP perlu dioptimalkan;
4. Kualitas SDM, sarana dan prasarana dalam mewujudkan pelayanan perlu dioptimalkan;
5. Pelayanan Sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja DPRD perlu dioptimalkan;

6. Aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Anggota DPRD yang dapat direalisasikan perlu dioptimalkan.

A. Strategi Peningkatan Kinerja ke Depan

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja berdasarkan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui bimbingan teknis, studi lanjut, pelatihan dan workshop khusus sesuai dengan kebutuhan pelayanan DPRD.
2. Meningkatkan kualitas Tenaga Ahli melalui perbaikan proses seleksi Tenaga Ahli, penetapan standar Tenaga Ahli, pelaksanaan MOU dengan lembaga pengirim dan memperluas Tenaga Ahli dari non Perguruan Tinggi.
3. Meningkatkan ketersediaan penunjang kinerja melalui pemenuhan kualitas sarana dan prasarana, reformasi pengelolaan keuangan, dan penyediaan administrasi perkantoran yang lengkap.
4. Mengembangkan aksesibilitas masyarakat melalui pengembangan Informasi Teknologi, peningkatan kualitas reses, kerjasama media massa dan pengembangan publik hearing serta sosialisasi dengan tokoh masyarakat.
5. Meningkatkan pengelolaan dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan melalui penyediaan sarana dan prasarana kearsipan, penyusunan sistem pengelolaan dokumentasi dan kearsipan, digitalisasi arsip dan dokumentasi dan sistem otomasi.

Untuk menukung hal tersebut Sekretariat DPRD Kota Surakarta memiliki Program/kegiatan/subkegiatan dan aktivitas prioritas tahun 2026, sebagai berikut :

Tabel 4.3. Kegiatan Prioritas Tahun 2026

Kegiatan (Kepmendagri 900.1.15.5-1317)	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output	Volume		Harga Satuan	Lokasi	Anggaran
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Honorarium Tenaga Ahli Alat Kelengkapan BAPEMPERDA (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA NON KONTRUKSI S/D 200 JUTA ; PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA NON KONTRUKSI S/D 200 JUTA - Perpres No. 33 Tahun 2020	-	OP	760.000	Sekretariat DPRD	Rp0,00
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bapemperda, Propemperda, dan Perubahan Propemperda	Jamuan Prasmanan	60	orang	91.000	Sekretariat DPRD	Rp5.460.000,00
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	448	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp17.024.000,00
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	448	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp6.720.000,00
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Honorarium Tenaga Ahli Alat Kelengkapan BAPEMPERDA (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Tenaga ahli alat kelengkapan DPRD	6	OK	750.000	Sekretariat DPRD	Rp4.500.000,00
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Sub Unit Perwakilan Rakyat Daerah)	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA NON KONTRUKSI S/D 200 JUTA ; PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA NON KONTRUKSI S/D 200 JUTA - Perpres No. 33 Tahun 2020	2	OB	680.000	Sekretariat DPRD	Rp1.360.000,00

Kegiatan (Keppmendagri 900.1.15.5-1317)	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output	Volume		Harga Satuan	Lokasi	Anggaran
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembahasan Raperda (Pansus) (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	7.500	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp285.000.000,00
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	7.500	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp112.500.000,00
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Publik Hearing (Pansus) (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	1.000	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp38.000.000,00
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	1.000	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp15.000.000,00
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Paripurna (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	3.000	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp114.000.000,00
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	3.000	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp45.000.000,00
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Belanja Honorarium Tenaga Ahli Atas Penyusunan Raperda	Tenaga Ahli ; Tenaga Ahli - NaN	28	Orang/ bulan	7.200.000	Sekretariat DPRD	Rp201.600.000,00
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Belanja Honorarium Tenaga Ahli Alat Kelengkapan	Tenaga ahli alat kelengkapan DPRD	12	OK	750.000	Sekretariat DPRD	Rp9.000.000,00

Kegiatan (Kepmendagri 900.1.15.5-1317)	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output	Volume		Harga Satuan	Lokasi	Anggaran
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dalam rangka Koordinasi Konsultasi dan Studi Banding (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Perjalanan Dinas Biasa ; Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Pembahasan Raperda	1	tahun	1.935.144.391	Sekretariat DPRD	Rp1.935.144.391,00
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Perjalanan Dinas Biasa ; Perjalanan Dinas Studi Banding Pansus	Perjalanan Dinas Biasa ; Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Raperda	1	tahun	1.603.934.400	Sekretariat DPRD	Rp1.603.934.400,00
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Perjalanan Dinas dalam rangka Harmonisasi, Fasilitasi, dan Koordinasi -	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	tahun	93.000.000	Sekretariat DPRD	Rp93.000.000,00
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Belanja Transportasi dan Akomodasi (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Uang transport/ akomodasi ; Uang transport/ akomodasi - Uang transport	660	orang	75.000	Sekretariat DPRD	Rp49.500.000,00
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA NON KONTRUKSI S/D 200 JUTA ; PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA NON KONTRUKSI S/D 200 JUTA - Perpres No. 33 Tahun 2020	2	OB	680.000	Sekretariat DPRD	Rp1.360.000,00
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Cetak Buku; / Cetak Laporan	82	buku	150.000	Sekretariat DPRD	Rp12.300.000,00
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	260	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp9.880.000,00
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	260	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp3.900.000,00

Kegiatan (Kepmendagri 900.1.15.5-1317)	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output	Volume		Harga Satuan	Lokasi	Anggaran
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honorarium narasumber profesional	18	OJ	1.700.000	Sekretariat DPRD	Rp30.600.000,00
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Honorarium Moderator	6	OK	700.000	Sekretariat DPRD	Rp4.200.000,00
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Honorarium Pembawa Acara	6	OK	400.000	Sekretariat DPRD	Rp2.400.000,00
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Belanja Jasa Dekorasi	Belanja Dekorasi ; / Jasa Dekorasi dan Dokumentasi	-	th	3.000.000	Sekretariat DPRD	Rp0,00
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Acara kajian Perundang-undangan (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Perjalanan Dinas ; Perjalanan Dinas - NaN	1	th	340.230.000	Sekretariat DPRD	Rp340.230.000,00
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Belanja Souvenir/Cinderamata/Hadiah	Seminar Kits Klasifikasi D	165	Paket	211.100	Sekretariat DPRD	Rp34.831.500,00
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Kain Batik Semi tulis ; / Souvenir Kain Batik	165	meter	812.500	Sekretariat DPRD	Rp134.062.500,00
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Perjalanan Dinas ; Paket Fullboard Meeting Luar Kota	1	th	260.000.000	Sekretariat DPRD	Rp260.000.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Sub Unit Perwakilan Rakyat Daerah)	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA NON KONTRUKSI S/D 200 JUTA ; PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA NON KONTRUKSI S/D 200 JUTA - Perpres No. 33 Tahun 2020	3	OB	680.000	Sekretariat DPRD	Rp2.040.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	65	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp2.470.000,00

Kegiatan (Kepmendagri 900.1.15.5-1317)	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output	Volume		Harga Satuan	Lokasi	Anggaran
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	65	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp975.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Naskah Akademik (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Jasa Konsultansi Non Konstruksi -Tipe 4 ; Naskah Akademik 1	1	Paket	75.000.000	Sekretariat DPRD	Rp75.000.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik		Jasa Konsultansi Non Konstruksi -Tipe 4 ; Naskah Akademik 2	1	Paket	75.000.000	Sekretariat DPRD	Rp75.000.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik		Jasa Konsultansi Non Konstruksi -Tipe 4 ; Naskah Akademik 3	1	Paket	75.000.000	Sekretariat DPRD	Rp75.000.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik		Jasa Konsultansi Non Konstruksi -Tipe 4 ; Naskah Akademik 4	1	Paket	75.000.000	Sekretariat DPRD	Rp75.000.000,00
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Cetak Buku Tata Tertib dan Kode Etik DPRD (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Cetak Buku	120	buku	150.000	Sekretariat DPRD	Rp18.000.000,00
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembahasan Tatib (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	250	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp9.500.000,00
	Penyusunan Tata Tertib DPRD		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	250	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp3.750.000,00

Kegiatan (Kepmendagri 900.1.15.5-1317)	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output	Volume		Harga Satuan	Lokasi	Anggaran
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Belanja Makanan dan Minuman Persiapan dan Evaluasi Pembahasan Tata Tertib DPRD	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	60	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp2.280.000,00
	Penyusunan Tata Tertib DPRD		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	60	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp900.000,00
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Paripurna (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	120	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp4.560.000,00
	Penyusunan Tata Tertib DPRD		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	120	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp1.800.000,00
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Belanja Honorarium Tenaga Ahli atas Penyusunan Tatib (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Tenaga ahli pendamping pansus pembahasan perda di DPRD	2	org/rap erda	7.200.000	Sekretariat DPRD	Rp14.400.000,00
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dalam rangka Koordinasi Konsultasi dan Studi Banding (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Perjalanan Dinas ; Perjalanan Dinas - NaN	218.180.000	Rupiah	1	Sekretariat DPRD	Rp218.180.000,00
Total Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD								Rp5.949.361.791,00
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembahasan KUA-PPAS dan Paripurna (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	750	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp28.500.000,00

Kegiatan (Keppmendagri 900.1.15.5-1317)	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output	Volume		Harga Satuan	Lokasi	Anggaran
	Pembahasan KUA dan PPAS		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	750	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp11.250.000,00
	Pembahasan KUA dan PPAS	Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	300.000.000	Rp	1	Sekretariat DPRD	Rp300.000.000,00
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembahasan dan Paripurna Perubahan KUA-PPAS (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	750	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp28.500.000,00
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	750	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp11.250.000,00
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Daerah (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa ; Belanja Perjalanan Dinas Biasa -	300.000.000	Rp	1	Sekretariat DPRD	Rp300.000.000,00
	Pembahasan APBD	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembahasan APBD	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	400	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp15.200.000,00
	Pembahasan APBD		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	400	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp6.000.000,00
	Pembahasan APBD	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembahasan APBD (Hearing) (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	110	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp4.180.000,00

Kegiatan (Kepmendagri 900.1.15.5-1317)	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output	Volume		Harga Satuan	Lokasi	Anggaran
	Pembahasan APBD		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	110	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp1.650.000,00
	Pembahasan APBD	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembahasan APBD (Paripurna)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	600	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp22.800.000,00
	Pembahasan APBD		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	600	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp9.000.000,00
	Pembahasan APBD	Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dalam rangka Koordinasi, Konsultasi dan Studi Banding (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa ; Belanja Perjalanan Dinas Biasa -	300.000.000	Rp	1	Sekretariat DPRD	Rp300.000.000,00
	Pembahasan APBD	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Transportasi dan Akomodasi	50	orang	75.000	Sekretariat DPRD	Rp3.750.000,00
	Pembahasan APBD Perubahan Perubahan	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembahasan, Paripurna, dan Hearing (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	1.110	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp42.180.000,00
	Pembahasan APBD Perubahan Perubahan		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	1.110	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp16.650.000,00

Kegiatan (Kepmendagri 900.1.15.5-1317)	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output	Volume		Harga Satuan	Lokasi	Anggaran
	Pembahasan APBD Perubahan Perubahan	Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dalam rangka Koordinasi, Konsultasi dan Studi Banding (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	300.000.000	Rp	1	Sekretariat DPRD	Rp300.000.000,00
	Pembahasan APBD Perubahan Perubahan	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Transportasi dan Akomodasi	19	orang	75.000	Sekretariat DPRD	Rp1.425.000,00
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pertanggung Jawaban APBD (Pembahasan, Hearing, Paripurna) (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	1.010	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp38.380.000,00
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	1.010	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp15.150.000,00
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dalam rangka Konsultasi dan Studi Banding (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Perjalanan Dinas ; Perjalanan Dinas - NaN	270.000.000	Rupiah	1	Sekretariat DPRD	Rp270.000.000,00
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Transportasi dan Akomodasi Peserta (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Uang transport/ akomodasi ; Uang transport/ akomodasi - Uang transport	20	orang	75.000	Sekretariat DPRD	Rp1.500.000,00
Total Pembahasan Kebijakan Anggaran								Rp1.727.365.000,00
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Komisi (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	1.320	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp50.160.000,00

Kegiatan (Kepmendagri 900.1.15.5-1317)	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output	Volume		Harga Satuan	Lokasi	Anggaran
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	1.320	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp19.800.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengawasan dan Sidak (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Jamuan Makan minum tamu skala nasional, internasional dan resepsi - Jamuan makan minum besar prasmanan	230	orang	91.000	Sekretariat DPRD	Rp20.930.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Perjalanan Dinas Komisi I	Perjalanan Dinas ; Perjalanan Dinas - NaN	1.100.893.190	Rupiah	1	Sekretariat DPRD	Rp1.100.893.190,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Komisi (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	1.320	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp50.160.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	1.320	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp19.800.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengawasan dan Sidak (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Jamuan Makan minum tamu skala nasional, internasional dan resepsi - Jamuan makan minum besar prasmanan	230	orang	91.000	Sekretariat DPRD	Rp20.930.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Perjalanan Dinas Komisi III	Perjalanan Dinas ; Perjalanan Dinas - NaN	1.100.893.190	Rupiah	1	Sekretariat DPRD	Rp1.100.893.190,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Komisi (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	1.320	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp50.160.000,00

Kegiatan (Kepmendagri 900.1.15.5-1317)	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output	Volume		Harga Satuan	Lokasi	Anggaran
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	1.320	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp19.800.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengawasan dan Sidak (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Jamuan Makan minum tamu skala nasional, internasional dan resepsi - Jamuan makan minum besar prasmanan	230	orang	91.000	Sekretariat DPRD	Rp20.930.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Perjalanan Dinas Komisi IV	Perjalanan Dinas ; Perjalanan Dinas - NaN	1.100.893.190	Rupiah	1	Sekretariat DPRD	Rp1.100.893.190,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Komisi (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	1.320	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp50.160.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	1.320	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp19.800.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengawasan dan Sidak (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Jamuan Makan minum tamu skala nasional, internasional dan resepsi - Jamuan makan minum besar prasmanan	230	orang	91.000	Sekretariat DPRD	Rp20.930.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Perjalanan Dinas Komisi II	Perjalanan Dinas ; Perjalanan Dinas - NaN	1.100.893.190	Rupiah	1	Sekretariat DPRD	Rp1.100.893.190,00
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jamuan makan minum (box)	50	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp1.900.000,00

Kegiatan (Kepmendagri 900.1.15.5-1317)	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output	Volume		Harga Satuan	Lokasi	Anggaran
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jamuan makan minum kecil (snack box)	50	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp750.000,00
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Perjalanan Dinas Komisi Dalam Rangka Pembahasan Anggaran (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa ; Belanja Perjalanan Dinas Biasa -	600.000.000	Rp	1	Sekretariat DPRD	Rp600.000.000,00
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Belanja Makanan dan Minuman Paripurna (Pembahasan LKPJ) (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	700	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp26.600.000,00
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	700	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp10.500.000,00
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Paripurna Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah) (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Jamuan Makan minum tamu skala nasional, internasional dan resepsi - Jamuan makan minum tamu khusus	300	orang	91.000	Sekretariat DPRD	Rp27.300.000,00
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Cetak Undangan (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Undangan	300	lembar	8.230	Sekretariat DPRD	Rp2.469.000,00

Kegiatan (Kepmendagri 900.1.15.5-1317)	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output	Volume		Harga Satuan	Lokasi	Anggaran
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Belanja Jasa Keahlian Khusus (Pembawa Acara Lokal, Saksi, Rohaniawan, Pembaca Doa, Pengambil Sumpah, Jasa Keamanan Kegiatan, Pejabat yang Melantik dari Pengadilan Negeri) (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Pembawa acara profesional	1	OK	750.000	Sekretariat DPRD	Rp750.000,00
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Belanja Jasa Keahlian Khusus (Pembawa Acara Lokal, Saksi, Rohaniawan, Pembaca Doa, Pengambil Sumpah, Jasa Keamanan Kegiatan, Pejabat yang Melantik dari Pengadilan Negeri) (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Honorarium Rohaniwan ; Honorarium Rohaniwan - Perpres No. 33 Tahun 2020	1	OK	300.000	Sekretariat DPRD	Rp300.000,00
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Belanja Jasa Keahlian Khusus (Pembawa Acara Lokal, Saksi, Rohaniawan, Pembaca Doa, Pengambil Sumpah, Jasa Keamanan Kegiatan, Pejabat yang Melantik dari Pengadilan Negeri) (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Jasa Tenaga Alih Daya Petugas Keamanan ; Petugas Keamanan - NaN	50	orang	100.000	Sekretariat DPRD	Rp5.000.000,00

Kegiatan (Kepmendagri 900.1.15.5-1317)	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output	Volume		Harga Satuan	Lokasi	Anggaran
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Belanja Jasa Keahlian Khusus (Pembawa Acara Lokal, Saksi, Rohaniawan, Pembaca Doa, Pengambil Sumpah, Jasa Keamanan Kegiatan, Pejabat yang Melantik dari Pengadilan Negeri) (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Jasa pembaca doa (Depak)	1	OK	178.000	Sekretariat DPRD	Rp178.000,00
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Belanja Sewa Tenda, Meja, Kursi, dan Perlengkapannya (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Sewa meja ; sewa meja round table	20	buah	119.000	Sekretariat DPRD	Rp2.380.000,00
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Belanja Sewa Tenda, Meja, Kursi, dan Perlengkapannya (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Sewa kursi ; sewa kursi - NaN	300	buah	5.600	Sekretariat DPRD	Rp1.680.000,00
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Sewa Sarung Kursi VIP	300	buah	4.500	Sekretariat DPRD	Rp1.350.000,00
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Belanja Sewa Taman Kegiatan DPRD (Dekorasi Panggung & Sewa Taman) (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Jasa Dekorasi Dalam Provinsi	2	m2	1.005.000	Sekretariat DPRD	Rp2.010.000,00
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Sewa Taman	1.300	paket	5.600	Sekretariat DPRD	Rp7.280.000,00

Kegiatan (Kepmendagri 900.1.15.5-1317)	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output	Volume		Harga Satuan	Lokasi	Anggaran
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Belanja Sewa Tenda, Meja, Kursi, dan Perlengkapannya (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Sewa Tenda 3x4 /3x5	5	Plong	486.000	Sekretariat DPRD	Rp2.430.000,00
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Studi Banding dan Konsultasi (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	214.000.000	Rp	1	Sekretariat DPRD	Rp214.000.000,00
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Belanja Honorarium Tenaga Ahli	Tenaga Ahli ; Tenaga Ahli - NaN	1	Orang/ bulan	7.200.000	Sekretariat DPRD	Rp7.200.000,00
Total Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								Rp5.681.209.760,00
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Belanja Makanan dan Minuman dalam Pelaksanaan Sidak DPRD Kota Surakarta	Jamuan Makan minum tamu skala nasional, internasional dan resepsi - Jamuan makan minum besar prasmanan	85	orang	91.000	Sekretariat DPRD	Rp7.735.000,00
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	225	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp8.550.000,00
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	225	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp3.375.000,00
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Belanja Jasa Penyelenggaraan acara Suara Warga	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	1.000	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp38.000.000,00

Kegiatan (Kepmendagri 900.1.15.5-1317)	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output	Volume		Harga Satuan	Lokasi	Anggaran
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	1.000	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp15.000.000,00
	Pelaksanaan Reses	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA NON KONTRUKSI S/D 200 JUTA ; PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA NON KONTRUKSI S/D 200 JUTA - Perpres No. 33 Tahun 2020	3	OB	680.000	Sekretariat DPRD	Rp2.040.000,00
	Pelaksanaan Reses	Belanja Flashdisc (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Flash Disk USB 2.0 16 GB	7	buah	103.400	Sekretariat DPRD	Rp723.800,00
	Pelaksanaan Reses	Belanja Cetak Banner/MMT/Spaduk (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Cetak Spanduk	125	buah	325.000	Sekretariat DPRD	Rp40.625.000,00
	Pelaksanaan Reses	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Reses (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	150	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp5.700.000,00
	Pelaksanaan Reses		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	150	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp2.250.000,00
	Pelaksanaan Reses	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Reses Masa Sidang I (Dapil Pasar Kliwon-Serengan) (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	4.400	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp167.200.000,00

Kegiatan (Kepmendagri 900.1.15.5-1317)	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output	Volume		Harga Satuan	Lokasi	Anggaran
	Pelaksanaan Reses		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	4.400	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp66.000.000,00
	Pelaksanaan Reses	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Reses Masa Sidang II (Dapil Pasar Kliwon-Serengan) (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	4.400	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp167.200.000,00
	Pelaksanaan Reses		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	4.400	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp66.000.000,00
	Pelaksanaan Reses	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Reses Masa Sidang III (Dapil Pasar Kliwon-Serengan) (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	4.400	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp167.200.000,00
	Pelaksanaan Reses		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	4.400	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp66.000.000,00
	Pelaksanaan Reses	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Reses Masa Sidang I (Dapil Jebres) (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	4.800	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp182.400.000,00
	Pelaksanaan Reses		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	4.800	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp72.000.000,00

Kegiatan (Kepmendagri 900.1.15.5-1317)	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output	Volume		Harga Satuan	Lokasi	Anggaran
	Pelaksanaan Reses	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Reses Masa Sidang II (Dapil Jebres) (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	4.800	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp182.400.000,00
	Pelaksanaan Reses		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	4.800	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp72.000.000,00
	Pelaksanaan Reses	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Reses Masa Sidang III (Dapil Jebres) (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	4.800	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp182.400.000,00
	Pelaksanaan Reses		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	4.800	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp72.000.000,00
	Pelaksanaan Reses	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Reses Masa Sidang I (Dapil Laweyan)) (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	3.200	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp121.600.000,00
	Pelaksanaan Reses		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	3.200	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp48.000.000,00
	Pelaksanaan Reses	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Reses Masa Sidang II (Dapil Laweyan) (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	3.200	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp121.600.000,00

Kegiatan (Kepmendagri 900.1.15.5-1317)	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output	Volume		Harga Satuan	Lokasi	Anggaran
	Pelaksanaan Reses		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYAKONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	3.200	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp48.000.000,00
	Pelaksanaan Reses	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Reses Masa Sidang III (Dapil Laweyan) (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	3.200	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp121.600.000,00
	Pelaksanaan Reses		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	3.200	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp48.000.000,00
	Pelaksanaan Reses	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Reses Masa Sidang I (Dapil Banjarsari I) (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	2.800	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp106.400.000,00
	Pelaksanaan Reses		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	2.800	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp42.000.000,00
	Pelaksanaan Reses	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Reses Masa Sidang I (Dapil Banjarsari II) (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	2.800	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp106.400.000,00
	Pelaksanaan Reses		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	2.800	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp42.000.000,00

Kegiatan (Kepmendagri 900.1.15.5-1317)	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output	Volume		Harga Satuan	Lokasi	Anggaran
	Pelaksanaan Reses	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Reses Masa Sidang II (Dapil Banjarsari I) (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	2.800	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp106.400.000,00
	Pelaksanaan Reses		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	2.800	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp42.000.000,00
	Pelaksanaan Reses	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Reses Masa Sidang II (Dapil Banjarsari II) (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	2.800	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp106.400.000,00
	Pelaksanaan Reses		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	2.800	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp42.000.000,00
	Pelaksanaan Reses	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Reses Masa Sidang III (Dapil Banjarsari I) (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	2.800	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp106.400.000,00
	Pelaksanaan Reses		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	2.800	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp42.000.000,00
	Pelaksanaan Reses	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Reses Masa Sidang III (Dapil Banjarsari II) (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	2.800	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp106.400.000,00

Kegiatan (Kepmendagri 900.1.15.5-1317)	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output	Volume		Harga Satuan	Lokasi	Anggaran
	Pelaksanaan Reses		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	2.800	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp42.000.000,00
	Pelaksanaan Reses	Belanja Sewa Meja, Kursi, Taplak dan Perlengkapannya (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Sewa Meja dan Taplak	3.600	buah	5.600	Sekretariat DPRD	Rp20.160.000,00
	Pelaksanaan Reses		Sewa kursi	36.000	buah	5.400	Sekretariat DPRD	Rp194.400.000,00
	Pelaksanaan Reses	Belanja Sewa Sound System dan Perlengkapannya (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Sewa Sound System ; Sewa Sound sistem 1000 watt	360	1000 watt	680.000	Sekretariat DPRD	Rp244.800.000,00
	Pelaksanaan Reses	Belanja Sewa Tempat untuk pelaksanaan Kegiatan Reses (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Sewa gedung pertemuan/GOR (Kapasitas 100 orang)	360	hari	592.000	Sekretariat DPRD	Rp213.120.000,00
	Pelaksanaan Reses	Honorarium Tim Pendamping Reses (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Uang Transport ; Uang Transport - NaN	360	orang / hari	75.000	Sekretariat DPRD	Rp27.000.000,00
	Pelaksanaan Reses	Honorarium Pengedar Undangan Reses (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Uang transport/ akomodasi ; Uang transport/ akomodasi - Uang transport	1.440	orang	75.000	Sekretariat DPRD	Rp108.000.000,00
Total Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								Rp3.793.478.800,00
Peningkatan Kapasitas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	Belanja Kontribusi Pendalaman Tugas DPRD (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Biaya Kontribusi Pimpinan dan Anggota DPRD - NaN	270	orang	7.500.000	Sekretariat DPRD	Rp2.025.000.000,00

Kegiatan (Kepmendagri 900.1.15.5-1317)	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output	Volume		Harga Satuan	Lokasi	Anggaran
	Pendalaman Tugas DPRD	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.083.154.000	Rp	1	Sekretariat DPRD	Rp1.083.154.000,00
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Honorarium Tenaga Ahli Fraksi (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	tenaga ahli pendamping fraksi S2	36	Orang/ bulan	4.000.000	Sekretariat DPRD	Rp144.000.000,00
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Honorarium Tenaga Ahli Fraksi (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Tenaga ahli pendamping fraksi S1	12	Orang/ bulan	3.500.000	Sekretariat DPRD	Rp42.000.000,00
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA NON KONTRUKSI S/D 200 JUTA ; PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA NON KONTRUKSI S/D 200 JUTA - Perpres No. 33 Tahun 2020	2	OB	680.000	Sekretariat DPRD	Rp1.360.000,00
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Belanja Cetak Banner/MMT/Spanduk (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Spanduk/ Backdrop ; Spanduk/ Backdrop - Bahan: MMT 280gram Cetak: Highress	64	meter	37.000	Sekretariat DPRD	Rp2.368.000,00
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Belanja Cetak Foto (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Photo Dokumentasi	1	Paket	1.774.000	Sekretariat DPRD	Rp1.774.000,00
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Belanja Seminar Kit/Souvenir (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Seminar kit Sosialisasi	1.580	buah	31.700	Sekretariat DPRD	Rp50.086.000,00
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Belanja Makanan dan Minuman Tamu untuk Penyelenggaraan Kegiatan Hearing (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	1.600	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp60.800.000,00

Kegiatan (Kepmendagri 900.1.15.5-1317)	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output	Volume		Harga Satuan	Lokasi	Anggaran
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	1.600	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp24.000.000,00
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Belanja Sewa Meja, Kursi dan Perlengkapannya (hearing/dialog) (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Sewa Meja dan Taplak	200	buah	36.000	Sekretariat DPRD	Rp7.200.000,00
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Sewa kursi ; sewa kursi - NaN	1.428	buah	5.600	Sekretariat DPRD	Rp7.996.800,00
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Belanja Sewa Meja, Kursi dan Perlengkapannya (hearing/dialog) (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Sewa Sound System ; Sewa Sound System - 1000 watt	8	unit	680.000	Sekretariat DPRD	Rp5.440.000,00
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA NON KONTRUKSI S/D 200 JUTA ; PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA NON KONTRUKSI S/D 200 JUTA - Perpres No. 33 Tahun 2020	1	OB	680.000	Sekretariat DPRD	Rp680.000,00
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Jamuan Makan Minum Rapat	728	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp10.920.000,00
	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jamuan Makan Minum (Snack Box)	728	buah	38.000	Sekretariat DPRD	Rp27.664.000,00
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Program Kerja DPRD (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Jasa Konsultan Perencana	1	Paket	50.000.000	Sekretariat DPRD	Rp50.000.000,00

Kegiatan (Kepmendagri 900.1.15.5-1317)	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output	Volume		Harga Satuan	Lokasi	Anggaran
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Perjalanan Dinas ; Perjalanan Dinas - NaN	250.000.000	Rupiah	1	Sekretariat DPRD	Rp250.000.000,00
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa untuk Jasa Pengumuman (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA NON KONTRUKSI S/D 200 JUTA ; PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA NON KONTRUKSI S/D 200 JUTA - Perpres No. 33 Tahun 2020	1	OB	680.000	Sekretariat DPRD	Rp680.000,00
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa untuk Baliho (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA NON KONTRUKSI S/D 200 JUTA ; PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA NON KONTRUKSI S/D 200 JUTA - Perpres No. 33 Tahun 2020	1	OB	680.000	Sekretariat DPRD	Rp680.000,00
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Belanja Cetak dan Penggandaan (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Cetak foto - Ukuran 4 R ; Cetak foto - Ukuran 4 R - NaN	255	lembar	8.230	Sekretariat DPRD	Rp2.098.650,00
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD		Selayang pandang ; Selayang pandang - NaN	375	buku	79.200	Sekretariat DPRD	Rp29.700.000,00
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Belanja Cetak Banner/MMT/Spanduk/Baliho (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Baliho 280 gr 4x 6m	27	buah	1.965.700	Sekretariat DPRD	Rp53.073.900,00
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Belanja Makanan dan Minuman Rapat untuk Pembuatan Selayang Pandang, Leaflet/Booklet Profil DPRD dan Koordinasi Pers (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	-	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp0,00

Kegiatan (Kepmendagri 900.1.15.5-1317)	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output	Volume		Harga Satuan	Lokasi	Anggaran
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	-	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp0,00
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum (box) - NaN	406	orang	38.000	Sekretariat DPRD	Rp15.428.000,00
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD		SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) ; SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - Jamuan makan minum kecil (snack box) - NaN	406	orang	15.000	Sekretariat DPRD	Rp6.090.000,00
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Penyelenggaraan Media Gathering	Jasa Penyelenggaraan Acara -Tipe 9	1	Paket	150.000.000	Sekretariat DPRD	Rp150.000.000,00
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Peliputan TV/Siaran Langsung Talk Show (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Peliputan TV/Siarang Langsung Talk Show (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	204.000.000	tahun	1	Sekretariat DPRD	Rp204.000.000,00
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Siaran Ulang Event Spesial (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Belanja Jasa Iklan Media Masa - NaN Siaran Ulang Event Special	63.000.000	tahun	1	Sekretariat DPRD	Rp63.000.000,00
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Greeting/Ucapan Selamat di Media Cetak (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Greeting/Ucapan Selamat di Media Cetak	65.032.000	tahun	1	Sekretariat DPRD	Rp65.032.000,00
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Sosialisasi Informasi Kegiatan Legislasi di Media Cetak/Elektronik (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Sosialisasi Informasi Kegiatan Legislasi di Media Cetak/Elektronik	185.000.000	tahun	1	Sekretariat DPRD	Rp185.000.000,00

Kegiatan (Kepmendagri 900.1.15.5-1317)	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output	Volume		Harga Satuan	Lokasi	Anggaran
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Greeting/Ucapan Selamat di Media Elektronik (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Greeting/Ucapan Selamat di Media Elektronik	15.000.000	tahun	1	Sekretariat DPRD	Rp15.000.000,00
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Peliputan TV Jaringan Nasional (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Siaran Langsung Televisi ; Peliputan TV/Siaran Langsung Nasional	200.000.000	tahun	1	Sekretariat DPRD	Rp200.000.000,00
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Siaran Radio/Siaran Langsung Talk Show (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Siaran Radio/Siaran Langsung Talk Show	58.500.000	tahun	1	Sekretariat DPRD	Rp58.500.000,00
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Penyelenggaraan Media Gathering	Belanja Perjalanan Dinas Liputan dalam rangka Media Nasional (Sub Unit : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	50.800.000	Rupiah	1	Sekretariat DPRD	Rp50.800.000,00
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Belanja Perjalanan Dinas Liputan dalam Rangka Media Nasional	Perjalanan Dinas Biasa ; Belanja Perjalanan Dinas Liputan dalam rangka Media Nasional	18.000.000	Rupiah	1	Sekretariat DPRD	Rp18.000.000,00
Total Peningkatan Kapasitas DPRD								Rp4.911.525.350,00
Total Anggaran Kegiatan Prioritas Sekretariat DPRD Kota Surakarta								Rp22.062.940.701,00

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 untuk Sekretariat DPRD, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi program kerja maupun kinerja dimasa yang akan datang.

Surakarta, Januari 2025

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA



KINKIN SULTANUL HAKIM, SH., MM

Pambina Utama Muda

NIP. 19670610 199402 1 003